KEBIJAKAN PEMERINTAH (UU NOMOR 06 TAHUN 2014) TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI PETANI JAGUNG DI DESA TAMPA

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



18 0401 0184

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2022

KEBIJAKAN PEMERINTAH (UU NOMOR 06 TAHUN 2014) TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI PETANI JAGUNG DI DESA TAMPA

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



.

18 0401 0184

Pembimbing:

Dr. Fasiha, M. EI.

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Kebijakan Pemerintah (UU Nomor 06 Tahun 2014) tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Petani Jagung di Desa Tampa yang ditulis oleh Zulpadli Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0401 0184, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 04 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan 09 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S. E.).

Palopo, 16 November 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M. H.

Ketua Sidang

2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. El., M. A.

Sekretaris Sidang

3. Zainuddin S, SE., M.Ak.

Penguji I

4. Muh. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.Sy

Penguji II

5. Dr. Fasiha, S.E.I., M.EI.

Pembimbing

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Takdir/S. H., M. H. NIP. 19790724 200312 1 002

Dr. Fasiha, S. B. h., M. EI.

NJP 19810213 200604 2 002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zulpadli

NIM : 18 0401 0184

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

 Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari tulisan orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya sendiri.

 Seluruh isi dari skripsi ini adalah tulisan saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala bentuk kesalahan yang terdapat didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan,

Zulpadli

18 0401 0184

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِه وَصَحْبهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدْ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Petani Jagung Pakan Ternak Di Desa Tampa Kabupaten Luwu".

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan do'a dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Sudirman, Ibunda Sumarni yang senantiasa memanjatkan doa kehadirat Allah S.W.T. memohon keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moral maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk

mereka semoga senantiasa berkah dalam limpahan kasih sayang Allah S.W.T.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yaitu:

- Prof Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akamedik, Tadjuddin, S.E., M.SI., Ak., CA, selaku Wakil Dean Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham S.Ag., MA. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- Dr. Fasiha S.E.,M.EI, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
- 4. Zainuddin S., SE, M.Ak selaku Dewan Penguji I, Muh. Ikhsan Purnama, SE.Sy., ME. Selaku Dewan Penguji II yang telah memberikan arahan dan memotivasi penulis dalam pentelesaian skripsi ini.
- 5. Dr. Fasiha, S.E., M.EI, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.

- 6. Dr. Fasiha S.E., M.EI, selaku Dosen Penasehat Akademik.
- 7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
- 8. Madehang S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
- 9. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa program studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 (khususnya kelas EKS E), yang selama ini telah ikut membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
- 10. Kepada semua sahabat seperjuangan Dion Syaputra, Rahmayanti, Muh. Asril Rifai, Rifaldi, Oky Okada, Fisal Gasali, Adhe Maharani Samsul, Karmila, Nirmalasari, Arnilam Ayudia Utami, Asriana, sidratil Mansur, Suci Rahmadani yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- 11. Kepada sahabat-sahabat KKN Kecamatan Bungku Selatan khususnya Posko7 Desa Bakala yang telah banyak memberikan saran, dan memotivasi penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

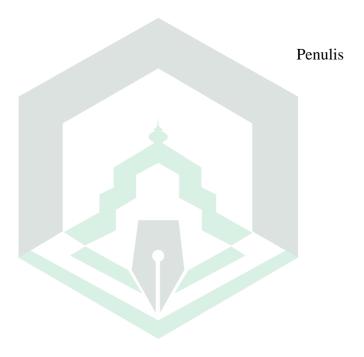
Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat

banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun ke arah yang benar dan lurus.

Palopo, 15 Juli 2022



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
<u>ب</u> ت	Ta	t	Te
ث ح ح خ	s\a	s\	es (dengan titik di atas)
ح	Jim	j	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
٦	dal	d	De
ذ	z∖al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
j	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش ش	syin	sy	es dan ye
س ش ص ض خ ط خ ف ف	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z }	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	•	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
	kaf	k	Ka
J	lam	1	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	W	We
_&	ha	h	На
ç	hamzah	,	Apostrof
ی	Ya	у	Ye

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	fathah	a	a
1,	kasrah	i	i
18	dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئى	Fathah dan ya'	ai	a dan i
َ ثُو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

: kaifa

haula: هَوْ لَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ا	Fathah dan alif atauya'	ā	a dan garis di atas
رحی	Kasrah dan ya'	ī	I dangaris di atas
'-و	Dammah dan wau	ü	U dan garis di atas

Contoh:

: mata

: ram<u>a</u>

gila: وَيْلَ

yamutu يَموُثُ

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu: *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

raudhah al-athfal: رَوْضَهُ الأَطْفَال

al-madinah al-fadh<u>i</u>lah : أَمْدِيْنَةُ ٱلْفَاضِلَة

al-hikmah: ٱلْحِكْمَـة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda *tasydid* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

_ rabbana: رَبَّـناَ

_ najjaina: نَجّيْناَ

al-haqq: اَلْحَقّ

nu"ima : نُعِّمَ

: 'aduwwun

Contoh:

: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah(az-zalzalah)

: al-falsafah

: al-bil<u>a</u>du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

: ta'muruna

'al-nau : ٱلنَّوْغُ

ينَيْءُ : syai'un

ىمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi. Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah"yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

_ billah بِاللهِ billah دِيـْنُ اللهِ

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al- jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadun illaa rasuul

Inna awwala baitin wudi'a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wali d Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = shubhanahu wa ta'ala

saw. = shallallahu 'alaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al-salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

Wr. = Warahmatullaahi

Wb. = Wabarakaatuh

- 1. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w. = Wafat tahun



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	
PRAKATA	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	XV
	xvii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR LAMPIRAN	XX
DAFTAR ISTILAH	XX
ABSTRAK 2	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Batasan Masalah	
C. Rumusan Masalah	
D. Tujuan Penelitian	
E. Manfaat Penelitian	
BAB II KAJIAN TEORI	1
	1
A. Penelitian Terdahulu yang relevan	1 1
B. Deskripsi Teori	10
 Kebijakan Pemerintah UU No. 6 Tahun 2014 	2:
	2
3. Kesejahteraan Ekonomi	2
4. Pemberdayaan	3:
C. Kerangka Pikir	Э.
BAB III METODE PENELITIAN	3
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	3:
B. Fokus penelitian	3
C. Definisi Istilah	3
D. Desain penelitian	3'
E. Data dan sumber data	3
F. Instrumen penelitian	3
G. Teknik pengumpulan data	4
H. Pemeriksaan keabsahan data	4
I. Teknik analisis data	4

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	4
A. Deskripsi Data	4:
B. Pembahasan	
BAB V PENUTUP	7
A. Simpulan	7
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	7
LAMPIRAN-LAMPIRAN	8



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1QS Ali-Imran/3: 110...... 5



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	38
Tabel 4.1 Data Kelompok Tani Jagung	46
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk	
Tabel 4.3 Data Kesejahteraan Masyarakat	
Tabel 4.4 Data Mata Pencaharian Masyarakat	
Tabel 4.5 Data Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Setelah Panen	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tampa	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Meneliti

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Keterangan Wawancara

Lampiran 4 SK Penguji

Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 6 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 7 Halaman Persetujuan Penguji

Lampiran 8 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 9 Nota Dinas Tim Verifikasi

Lampiran 10 Turnitin

Lampiran 11 Dokumentasi

Lampiran 12 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

Public Policy: Sejumlah atau beberapa aktivitas pemerintah yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah yang ada dimasyarakat.



ABSTRAK

Zulpadli, 2022. "Kebijakan Pemerintah (UU Nomor 06 Tahun 2014) Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Petani Jagung Di Desa Tampa". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Fasiha, M.EI.

Skripsi ini membahas tentang Kebijakan Pemerintah (UU Nomor 06 Tahun 2014) Tentang Pemberdayaan Masyrakat Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Petani Jagung Di Desa Tampa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani jagung; untuk menjelaskan bagaimana konsep pemberdayaan petani jagung di Desa Tampa dan mengetahui perekonomian masyarakat (pendapatan). Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyrakat Petani Jagung di Desa Tampa yaitu dengan memberikan pemberdayaan berupa pelatihan atau pembinaan, bantuan modal berupa bibit/benih dan fasilitas berupa alat mesin penggiling. Adapun pembahasan terkait dengan kebijakan Pemerintah dalam penelitian ini sangat berguna untuk memahami bagaimana implementasi dari kebijakan pemberdayaan tersebut serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Pemberdayaan, Perekonomian Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pertanian memengaruhi kehidupan semua orang, termasuk kesejahteraannya. Reaksi setiap orang terhadap suatu kebijakan akan berbedabeda tergantung pada keadaan masing-masing dan dampak kebijakan tersebut pada kesejahteraan dan kepentingan lainnya. Kebijakan pertanian public policy di bidang pertanian, salah satu bentuk sosial control untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya tujuan pemberdayaan petani dan isi pokok tujuan pemberdayaan petani tersebut dan kesamaannya walaupun dengan rumusan dan tekanan yang berbedabeda yaitu untuk meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pemerataan kegiatan pemberdayaan petani dengan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup, pelestarian sumber daya dan sebagainya.

Menurut **UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 bahwa pemberdayaan masyarakatdesa ialah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan peengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan ssumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa.

UU Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mengembangkan desa. UU Desa lebih pada pendekatan pemberdayaan masyarakat desa yang memposisikan masyarakat desa tidak hanya sekedar sasaran (objek) saja namun juga sebagai pelaku utama. Melalui pemberdayaan masyarakat desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga kesejahteraan masyarakat bisa pulih kembali.1

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat yang ditandai dengan kemandirian sehingga dapat membangkitkan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, dan berperilaku untuk maju. Maka pemberdayaan masyaarakat merupakan ttik strategis yang harus di perbarui dan diperluas. sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan ialah pendayagunaan sumber daya lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian masyarakat. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembagunan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai pelaksana otonomi daerah yang menhaguruskannya mampu mengelola dan mengembangkan potensi alam yang beranekaragam yang dimiliki baik itu pertanian, industri dan lain-lain. Dalam era reformasi saat ini, otonomi daerah telah diterapakn secara menyeluruh sejak tahun 2002 sehingga roda pembangunan diharapkan lebih dekat ke masyakarat, lebih

¹Drs. Suharto "Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Implementasi UU Desa (Analisis Implementasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)" 2018,1-2.

cepat pelayanannya, lebih murah biayanya, dan lebih sesuai dengan kebutuhan rillnya. Untuk itu, tingkat keberhasilan pembangunan (kinerja) suatu daerah perlu diukur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia.²

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Luwu jika dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan ekonominya selama periode 2016-2020 menunjukkan pergerakan yang berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen. Selanjutnya, struktur ekonomi kabupaten Luwu dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Hal ini diakibatkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang secara tidak langsung mempengaruhi kegiatan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020, peranan sektor pertanian terhadap perekonomian daerah masih sangat besar yakni sekitar 52,11 persen. Sektor lain yang mempunyai kontribusi cukup besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi sekitar 9,98 persen, sektor konstruksi sebesar 8,60 persen, sektor real estate sebesar 5,84 persen, sedangkan sektor lainnya menujukkan kontribusi yang relatif kecil dibawah lima persen.³

Dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, perlu didukung dengan pengelolaan dan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemrintahan diperlukan perilaku pemerintah jujur, terbuka, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat, perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran pemerintah dan masyarakat dalam

²BPS, Badan Pusat Statistik) "Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu 2020"

³BPS, Badan Pusat Statistik) "Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu 2020"

proses pengambilan keputusan bersama. Artinya, bahwa perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan tersebut.⁴

Pemberdayaan berasal dari kata "daya", yang berarti kekuatan atau kemampuan karena memiliki makna perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan yang lemah. Pemberdayaan merupakan satu strategi untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan asas kerakyatan. Dimana segala upaya diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat diaktualisasikan melalui partisipasi masyarakat dan pendampingan pemerintah atau lembaga tertentu untuk meningkatkan sumber daya manusia kepada kelompok masyarakat secara terorganisir.⁵

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyakat melalui beberapa kegiatan, salah satunya adalah pembangunan usaha ekonomi demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri.⁶

Agenda pemberdayaan masyarakat juga sesuai yang dimaksud oleh Allah SWT sebagaimana tercantum dalam QS Ali-Imran/3: 110 yang berbunyi sebagai berikut:

⁵Dr. Saifuddin Yunus, Dr. Suadi, Fadli "Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu" (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017) 1&3.

⁴HAW. Widjaja," Otonomi Daerah" (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) 14.

⁶Chyntia P. Marentek, Pdf, "Peran Pemerintah dalam Memberdayakan Masyarakat di Era Otonomi Daerah", 1.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ أَ وَلَوْ أَمَنَ الْمُنْعِرُ الْمُنْعِرُونَ وَاكْتَرُهُمُ الْفُسِقُوْنَ ١١٠ أَمَنَ اَهْلُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاكْتَرُهُمُ الْفُسِقُوْنَ ١١٠

Terjemahnya:

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat dalam mencapai taraf hidup yang berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia, dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan materil hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas dalam pelayanan, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau seluruh starata masyarakat.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah Kabupaten/Kota. Pengembagan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari pengembangan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, karena itu konsep pengembangan ekonomi masyarakat dengan konsep pengembangan masyarakat secara umum tidak jauh berbeda serta tidak terlepas dari konsep besar dari pengembangan masyarakat itu sendiri.⁷

_

⁷Rahmi, Skripsi Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantaeng, (Makassar, 2018), 4.

Salah satu daerah yang ada yang ada di Luwu dalam kurun tiga tahun terakhir mulai mengembangkan perekonomiannya pada sektor pertanian yaitu Desa Tampa, Kecamatan Ponrang. Dimana sebagian masyarakat setempat mulai membudidayakan Tanaman jagung pakan ternak sebagai sumber penghasilannya. Berdasarkan data Kelompok Tani yang ada desa Tampa bahwa saat ini ada 15 jumlah petani jagung pakan ternak yang tergabung dalam kelompok tani, dengan masing-masing luas lahan sekitar satu (1) hektar.

Jika dilihat dari potensi sumber daya alam, Desa Tampa memiliki prospek yang cukup baik sebagai penghasil produksi jagung yang menjanjikan apabila masyarakat menyadari bahwa bidang pertanian dapat dijadikan sebagai aset yang menjanjikan masa depan mereka. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, tentunya sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya khususnya dari sektor pertanian. Namun yang menjadi permasalahan adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat petani dalam mengelola potensi tersebut. Selain itu, kurangnya bantuan modal usaha yang diberikan kepada para petani dalam meningkatkan produksi pertaniannya. Seharusnya, dengan adanya potensi sumber daya alam harus dibarengi dengan sumber daya manusia untuk mengelola potensi tersebut serta perlu adanya dukungan modal usaha yang berikan terhadap masyarakat petani yang notabenenya memiliki tingkat perekonomian menengah kebawah.

Tentunya bahwa potensi sektor pertanian ini menjadi penting untuk disusun sebagai strategi pembangunan perekenomian, sebab potensi sektor pertanian khususnya petani jagung pakan ternak menjadi prioritas penting seiring meningkatnya hasil produksi pertanian. Maka dari itu, untuk meningkatkan hasil pertanian berdasarkan potensi yang ada tentu diperlukan dukungan modal dan personil yang mampu memberikan pemahaman kepada produsen jagung hingga pasca produksi hasil pertanian.

Maka dari itu, peran pemerintah tingkat daerah perlu di kembangkan melalui peningkatan kapatitas dan kemampuan pemahaman mulai dari proses produksi hingga pasca produksi hasil pertanian. Selain itu, alokasi sumber dana dengan demi mendukungnya terjaminnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertanian tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan para petani jagung. Sektor pertanian baik formal maupun informal khususnya khususnya di daerah pedesaan seharusnya memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produksi dan pendapatan serta kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan petani jagung di desa Tampa. Namun kinerja pemerintah belum optimal dicirikan oleh masih sulitnya akses petani jagung terhadap pelayanan lembaga-lembaga ada yang mengakibatkan produktivitas dan pendapatan petani jagung relatif masih rendah.

Untuk meningkatkan sektor pertanian, maka perlu adanya perhatian pemerintah terhadap petani jagung di desa Tampa yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan pereknomian saat ini disebabkan karena semakin tingginya harga hasil pertanian khususnya petani jagung di seluruh Indonesia dibarengi dengan pengetahuan para petani jagung mulai dari proses produksi hingga pasca prduksi. Selain itu, kurangnya modal yang di miliki para petani jagung diyakini akibat lemahnya perlindungan pemerintah.

Oleh karena itu, diharapkan peranan dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah desa Tampa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani jagung yang ada di daerahnya. Kecamatan Ponrang khususnya desa Tampa merupakan daerah yang cukup kaya akan sumber daya alam tetapi tidak diimbangi dengan sumber daya manusianya khususnya di bidang pertanian dan kurangnya modal yang dimiliki sehingga peran pemerintah sebagai fasilitator, dinamisator, regulator dan katalisator sangat di butuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan petani jagung di desa Tampa.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul: "Kebijakan Pemerintah (UU nomor 06 tahun 2014) Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Petani Jagung Di Desa Tampa".

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, dan mendalam maka penulis melihat masalah penelitian yang dilakukan perlu diberi batasan variabel. Oleh karena itu, penulis membatasi hanya yang berkaitan dengan "kebijakan pemerintah, konsep pemberdayaan petani jagung melalui pendidikan dan pelatihan dan bantuan modal usaha di Desa Tampa". Pendidikan dan pelatihan serta bantuan modal merupakan tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di Desa Tampa demi meningkatkan perekonomiannya.

⁸ Muh Nurdin, Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, 2018, 3-4.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana Konsep Pemberdayaan Petani Jagung di Desa Tampa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu?
- 2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk Mengetahui Konsep Pemberdayaan Petani Jagung di Desa Tampa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
- Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Berdasarkan UU
 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitan ini di harapakan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagaikontribusi dan sumbangsih pemikiran terkhusus kepada masyarakat dan pemerintah dalam hal pemberdayaan petani jagung pakan ternak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan kedepannya bisa memaksimalkan potensi yang ada di daerah sehingga dapat meningkat kesejahteraan ekonomi setempat.
- b. Bagi pemerintah, hasil dari penelitan ini diharapkan dapat menjadi fasilitator yang berkualitas bagi masyarakat setempat.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

- 1. Deni Ardila dan Fitri Eriyanti pada tahun 2019 yang berjudul "Pemberdayaan Petani Jagung Oleh Stalkhorders Di Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman". Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, maka penulis memberi kesimpulan bahwa Bentuk Pemberdayaan Petani Jagung di Nagari Kataping oleh Stakeholders dilakukan dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan pembinaaan. Pelatihan dan pembinaan ini dilakukan secara berkelompok tentang bagaimana pemberian pupuk yang baik terhadap tanaman jagung dan pemberian bantuan bibit jagung terhadap petani jagung. Pelatihan dan pendampingan ini dimulai dari budidaya jagung dengan contoh bagaimana pembibitan jagung yang baik, penanaman jagung yang baik, serta pemberian obata-obatan pada jagung. Pemberdayaan inidilakukan agar masyarakat petani jagung dapat meningkatkan pendapatan dan penambah ilmu pengetahuan mengenai cara bertanam jagung yang baik. Faktor Penghambat dari Pemberdayaan Petani Jagung di Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai adalah:
- a. Terbatasnya modal yang dimiliki oleh petani jagung, sehingga banyak petani yang bekerjasama dengan toke atau kios-kios.

- b. Partisipasi dari kelompok tani dalam mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan dari penyuluh sangatlah sedikit.
- c. Pemasaran jagung setelah panen.⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Deni Ardila dan Fitri Eriyanti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif dan mengkaji tentang pemberdayaan petani jagung. Adapaun perbedaannya adalah penelitian terletak pada objek penelitiannya. Dimana penelitian pertama meneliti pemberdayaan petani jagung di Nagari Kataping, kecamatan Batang Anai, kabupaten Padang Pariaman. sedangkan peneliti akan melakukan penelitian berfokus pada pemberdayaan petani jagung yang ada di desa Tampa, kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Tentunya bahwa dengan objek penelitian yang berbeda maka akan menghasilkan data dan informasi yang berbeda pula.

- 2. Rofiatul Maghfiroh, Nurul Umi Ati, dan Sunariyanto pada tahun 2021 yang berjudul "Implementasi kebijakan Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo)". Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:
- a. Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo bisa dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 3 program yang dihasilkan oleh bagian pelaksana penyuluhan dan bina usaha tani dan

_

⁹ Deni Ardila, Fitri Eriyanti "Pemberdayaan Petani Jagung Oleh Stakeholders di Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman" *Journal Of Education On Social Science*, Vol. 3 No. 2, 2019.

- berfokus pada peningkatan hasil pertanian, yakni peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian, peningkatan program dan informasi penyuluhan, dan pengembangan agribisnis.
- b. Program dari kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesejahteraan petani, yaitu dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian, peningkatan program dan informasi penyuluhan, dan pengembangan agribisnis.
- c. Model dari kebijakan Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan dari kebutuhan dan perencanaan yang diusulkan oleh kelompok tani yang sudah melalui persetujuan dari pusat di tahunsebelumnya.
- d. Sasaran dari kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo berupa peningkatan produksi pangan, holtikultura dan tanaman perkebunan petani, terhitung hasil beberapa hasil produksi tanaman mengalami peningkatan.
- e. Faktor pendukung implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesejahteraan petani adalah *communication*, *resource* dan sarana prasarana, pemodalan petani, dan jumlah produksi.
- f. Faktor penghambat implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesejahteraan petanian sumber daya manusia, iklim dan cuaca, berkurangnya luas lahan,

teknologi dan sarana prasarana, serta harga komoditi pasar.¹⁰

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rofiatul Maghfiroh, Nurul Umi Ati, dan Sunariyanto dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode penelitian yang sama dan kebijakan mengkaji tentang pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada objek penelitiannya. Dimana penelitian pertama meneliti implementasi kebijakan pemerintah di Kabupaten Probolinggo sedangkan peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada kebijakan pemerintah di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Tentunya bahwa dengan objek penelitian yang berbeda maka akan menghasilkan data dan informasi yang berbeda pula.

3. Hendry Remi Wantania, Fanley Pangemanan dan Welly Waworundeng pada tahun 2022 "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Buah Pepaya di Desa Laikit Kabupaten Minahasa Utara". Pertama dari aspek isi kebijakan pemberdayaan, peneliti tidak mendapatkan produk kebijakan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Pemerintah Desa Laikit di Bidang Pemberdayaan Petani buah Pepaya yang bersifat produk hokum tertulis. Hanya ada program yang tertuang dalam Rencana Strategis (Restra) Daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016-2020 yang tidak dijalankan dengan baik di lapangan, dan

__

¹⁰Rofiatul Maghfiroh, Nurul Umi Ati, dan Sunariyanto "Implementasi kebijakan Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo)", *Jurnal Respon Publik*, vol. 15 no. 4 2021.

kebijakan itu pun hanya bersifat turunan dari pemerintah pusat. Kebijakan semisalnya soal pemberian sarana dan prasarana, penyuluh pertanian, serta pengembangan sektor pertanian berbasis perkembangan ilmu pengetahuan tidak ada di lapangan. Sehingga peneliti sampaikan Produk kebijakan daerah saja tidak terlihat, itu berarti implementasinya di lapangan tidak berjalan dengan baik. Kedua dari aspek Lingkungan implementasi kebijakan, Peneliti tidak mendapatkan program-program strategis pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara di bidang Pemberdayaan petani buah Pepaya. Namun adanya upaya dari pemerintah Desa Laikit membentuk kelompok tani guna menggerakan ekonomi masyarakat petani, dapat memberikan sedikit kesempatan bagi petani buah pepaya agar tetap mempertahankan hasil produktivitas pertanian buah papaya Desa Laikit.¹¹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hendry Remi Wantania, Fanley Pangemanan dan Welly Waworundeng dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif dan mengkaji tentang pemberdayaan petani buah pepaya. Adapaun perbedaannya adalah penelitian terletak pada objek penelitiannya. Dimana penelitian pertama meneliti pemberdayaan petani buah pepaya di Desa Laikit Kabupaten Minahasa Utara. sedangkan peneliti akan melakukan penelitian berfokus pada pemberdayaan petani jagung yang ada di desa Tampa, kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

¹¹Hendry Remi Wantania, Fanley Pangemanan dan Welly Waworundeng "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Buah Pepaya di Desa Laikit Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal Governance*, vol. 2 no. 1 2022.

B. Deskripsi Teori

1. Kebijakan Pemerintah

a) Pengertian Kebijakan Pemerintah

Pada prinsipnya kebijakan pemerintah dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar atau sasaran kebijakan yang telah ditetapkan diawal. Kebijakan yang dimaksud merupakan usaha mencapai tujuan tertentu sasaran tetentu pada urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah itu sendiri memiliki pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum. Kebijakan dalam hal ini adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik untuk memilih tujuan dan cara yang hendak dicapai. 12

b) Indikator Kebijakan Pemerintah

1. Kebijakan Publik

Menurut Woll, kebijakan publik merupakan sejumlah aktivitas pemerintah dalam memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut James E. Anderson memberikan definisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Adapun implikasi dari kebijakan pemerintah yaitu:

¹²Ahmad Rifki Hermawan, skripsi tentang *Pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, (Lampung, 2020)*

- Kebiijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau memiliki tindakantindakan yang berorientasi pada tujuan.
- 2) Kebijakan publik berisi tindakan pemerintah.
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- 4) Kebijakan publik yang diambil bias bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segalah sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- b. Kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan¹³.

Kebijakan publik juga memiliki tujuan, adapun tujuan dari kebijakan publik yaitu:

- 1) Untuk mendistribusikan (alokatif, distributif dan redistributif) serta untuk mengabsorbsi.
- 2) Untuk meregulasi dan meliberasi.
- 3) Untuk menstabilkan dan untuk membuat dinamika.
- 4) Untuk memperkuat Negara dan memperkuat pasar. 14

Kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Adapun proses kebijakan

¹³Hessel Nogi Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi*, (Lukman Offset, Yogyakarta: 2017), 2.

¹⁴Riant Nugroho, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 60.

publik menurut James E. Anderson adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi masalah dan agenda setting, focus pada tahap ini adalah bagaimana masalag-masalah bias dijadikan sebagai kebijakan publik yang dispesifikasikan dan di identifikasikan. Mengapa hanya beberapa masalah dari semua yang ada, yang dapat menerima pertimbangan oleh pembuat kebijakan yang membutuhkan sebuah pemeriksaan dari agenda setting.
- Formulasi, tahap ini meliputi berbagai macam tindakan berupa pembuatan dan pengidentifikasian, seringkali disebut pilihan untuk memecahkan atau memperbaiki masalah publik.
- 3) Adopsi, tahap ini tentang memutuskan pilihan yang dimaksud, termasuk mengambil tindakan yang digunakan untuk mengatasi masalah.
- 4) Implementasi/pelaksanaan, pada tahapan ini perhatiannya pada apa yang terselesaikan untuk melaksanakan atau menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 5) Evaluasi, kegiatan ini memerlukan maksud menentukan apakah sebuah kebijakan terpenuhi.¹⁵

2) Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia Wikipedia (dalam Riant Nugroho, 2008:35-36) menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalam tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

¹⁵James E. Anderson, *Public Policimaking-Sixich Edition*, (Houghton Miffilin Company, Boston. 2019), 3-4.

c. Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatua Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁶

Berdasarkan undang-undang paragrap kesatu mengatur tentang kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tardapat pada Pasal 24 UU No.32/2004 yang diubah dengan UU No.8/2005 mengemukakan. (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. (2) Kepala daerah sebagaimana yang diamaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut wali kota. (3) Kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh wakil kepala daerah. (4) Wakil kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil walikota. (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diamaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Adapun tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam UU paragraf Kedua UU No.32/2004 mengatur mengenai tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasal 25 menerangkan, kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

¹⁶Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintah Daerah.

- Memimpin penyelenggaran pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- 2) Mengajukan rancangan perda.
- 3) Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- 5) Menupayakan iterlaksananya kewajiban daerah.
- 6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.¹⁷

d. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur serta menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi Pemerintah daerah menurut undang-undang no.23 tahun 2004 adalah:

- Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
- 2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- 3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki

¹⁷Drs.Sarman, MH dan Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH., MH, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, cetakan pertama, (Jakarta: Rineka Cipta 2019), 104.*

hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.¹⁸

e. Kewajiban Pemerintah Daerah

Pemerintah daeraeh juga diberi beberapa kewajiban, yaitu:

- Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kualitas kehiduan masyarakat
- 4) Mengembangkan kehidupan demokrasi
- 5) Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- 6) Meningkatkan pelayanan dasar pen didikan
- 7) Menyediakan fasilitas kesehatan
- 8) Menyediakan fasilits sosial dan fasilitas umum yang layak
- 9) Mengembangkan sistem jaminan sosial
- 10) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- 11) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- 12) Mengelola administrasi kependudukan
- 13) Melestarikan nilai sosial budaya Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan kewajiban lainnya yang diatur dalam perundang- undangan.¹⁹

Hak dan kewajiban derah tersebut diwujudkan dalam suatu bentuk rencana kerja pemerintah daerah lalu dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelolah dalam sebuah sistem pengelolaan keuangan

¹⁸Republik Indonesia, Undang-Undang No.32 *Tentang Pemerintahan Daerah* 2016

¹⁹Republik Indonesia, 2016. Undang-Undang No.32 Tentang Pemerintahan Daerah

daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan diatas pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.²⁰

Dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan lain. Otonomi daerah mengarahkan pada kemandirian pemerintah, masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pelayanan dan produktivitas ekonomi pemerintah dan masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang makmur dan sejahtera.²¹

f. Peranan Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis dimana hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku sebagai pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan dan keadilan serta ketentraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah

²¹ Muh Rulan Abdullah, Pengelolaan Zakat dalam Tinjauan UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2018 vol 3 no 1.

²⁰Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT. Raja Grasindo, 2017), 27-30.

yang direncanakan dalam waktu tertentu.²²

2. UU Nomor 6 tahun 2014

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala di dalam pembangunan masyarakat desa yaitu antara lain: Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa baik di bidang sosial budaya dan ekonomi dan untuk mempercepat pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. UU Desa juga dapat memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri. Meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai Garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Dan akhirnya dapat mendorong, meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Lebih jelas tentang pengaturan desa ini tertuang dalam pasal 4 UU Desa yaitu:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.

²²Armando Soeres, Ratih Nurpratiwi dan M. Makmur dalam jurnalnya yang berjudul "*Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*" Jurnal Ilmu sosial dan Politik 4, no 2 (2018), 232. https://publikasi.unitri.ac.id/indeks.php/fisip/article/view/102#.

- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri disebut dengan self-governing community. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah "republik kecil" yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat.

UU Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. UU Desa lebih pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memposisikan masyarakat desa sebagai subyek (pelaku utama) dan tidak hanya sekedar obyek (sasaran) saja. Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan self-help. untuk meningkatkan kualitas kemampuan hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Maka bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian(berdikari) masyarakat.

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk menyejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif

dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.²³

3. Kesejahteraan Ekonomi

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata kesejahteraan merupakan kata benda yang mempuyai arti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Sedangkan dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkna terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain:

- 1. Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat
- 2. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat.
- 3. Potensi regional (sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi
- 4. Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.²⁴

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang

²⁴Muhammad Yunus dan Eka Pratiwi Septania Parapat, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Menciptakan Kesejahteraan Keluarga Melalui Budi Daya Jagung di Desa Sarimatondang*, Jurnal EK&BI Vol \$ No.2 Desember 2021, 518-519.

²³Drs. Suharto "Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Implementasi UU Desa (Analisis Implementasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)" 2018, 1-2.

saling berhubungan. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilhihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitifuntuk mencari keuntungan merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang sangatwajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar. Maka dari itu, perlu adanya kajian kesejahteraan.

Ekonomi dalam membangun suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu kondisi yang sejahtera dalam skala bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga.

a. Peningkatan Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan seabagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung

tinggi hak-hak asasi.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.²⁵

b. Indikator Kesejahteraan

Sebagaimana diketahui bahwa sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, suatu kondisi dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Untuk mendapatakan ksejahteraan tersebut tentu tidak mudah. Tetapi bukan berarti mustahil untuk didapatkan. Adapun indikator kesejahteraan sebagai berikut.

- 1. Adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif. Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Tentunya bahwa penghasilan/pendapatan berhubungan dengan lapangan pekerjaan, kondisi usaha, dan fakror ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semuan pihak tanpa terkecuali agar masyarakat dapat memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Salah satu tanda bahwa belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah dan sebaran pendapatan yang mereka terima.
- 2. Akses pendidikan yang mudah untuk dijangkau. Pengertian mudah dalam hal

-

²⁵A. Ghofar Purbaya, *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat* (*Kasus Pengusaha Krupuk dan Camilan Hasil Laut di Pantai Kenjeran Lama Surabaya*, Jurnal Of Economics Vol 1 no.1, 2018, h. 75-76

ini adalah jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidkan mudah dan murah merupakan impian bagi semua orang. Tentunya bahwa dengan ini semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggitingginya sehingga sumber daya manusia semakin meningkat.

3. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Sebagaimana diketahui bahwa kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan ekonomi dan pendidikan. Karena kesehatan adalah hal yang harus ditempatkan sebagai faktor utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit dalam memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Pelayanan kesehatan harus sangat banyak sehingga mudah diakses oleh masyarakat yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukan oleh para pakar. Bila dilihat dari akar katanya, "daya" merupakan kata dasar dan ditambah awalan "ber", yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan.

Berdasarkan penjelasan tadi, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenanga/kekuatan. Dalam bahasa indonesia, kata pemberdayaan berasal dari bahasa inggris, yaitu *empowerment*. Merrian Webster dalam *Oxford English Dictionary* Mengartikan empowerment dalam 2 (dua) arti yaitu:

1. To give ability or enabe to, yang diterjemahkan sebagai memberi

kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu.

2. To give power of authority to, yang berarti memberi kewenangan/kekuasaan.²⁶

Menurut Poerwoko dan Totok Mardikanto (2015) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya dalam peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang di dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan danketertinggalan. Dengan kata lain, pemberdayaan merupakan memampukan dan memandirikan suatu masyarakat.

Dalam pemberdayaan tersebut dapat kita lihat ada tiga sisi upaya, diantaranya:

- Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi suatu masyarakat berkembang
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat
- 3) Memberdayakan berarti melindungi, melindungi berarti tidak mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal tersebut justru akan memperkecil yang kecil dan mengabaikan yang lemah. Dapat dipahami bahwa, pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang. Hal ini didasarkan bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya/kekuatan.

Menurut Pranaka dan Prijono, (1996) merumuskan 3 (tiga) bentuk pemberdayaan masyarakat diantaranya:

1. Bentuk Inisial, merupakan bentuk pemberdayaan dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat (masyarakat).

_

²⁶Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019) h. 1

- Bentuk Partisipatoris, merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, danuntuk rakyat (masyarakat).
- 3. Bentuk Emansipatif, merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dari rakyat, untuk rakyat, dan di dukung oleh pemerintah bersama masyarakat.

Menurut Sukino (2013) ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan petani diantaranya:

- 1. Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat tani harus demokrasi.
- 2. Mengembangkan sistem partisipasi.
- 3. Memberikan otonomi yang lebih luas terhadap masyarakat tani untuk membangun desanya.²⁷

Menurut Basyid, pemberdayaan masyarakat tidak saja dilakukan melalui pendekatan teknis tetapi juga pendekatan sosial budaya yang dapat merangsang perubahan sikap, perilaku dan pola kerja. Untuk mendukung proses tersebut maka peran pemerintah dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mendukung sektor pertanian dan lingkungan usaha, fasilitasi percepatan pembangunan di wilayah pedesaan, pembentukan iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat.

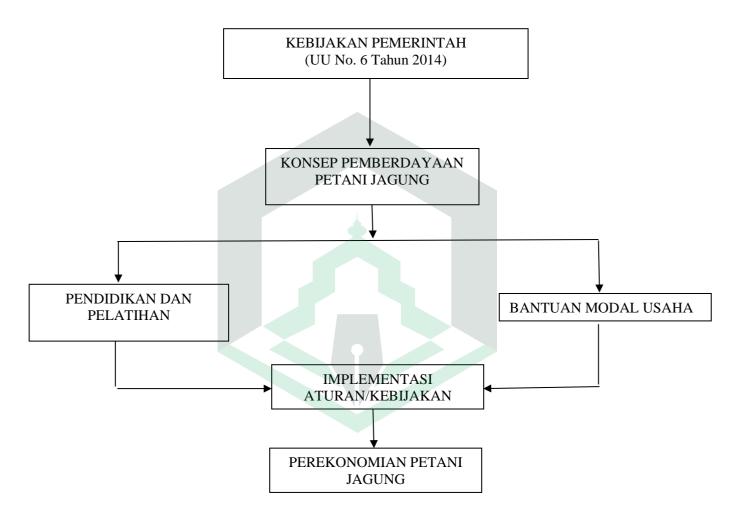
²⁷Deni Ardila dan Fitri Eriyanti, *Pemberdayaan Petani Jagung Oleh Stakeholders di Nagarai Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Ariaman*, Journal of Education on Social Science Vol 3 No. 2 Oktober 2019, h. 34-35

Sedangkan menurut Burhan pemberdayaan dilakukan dengan cara memposisikan para petani sebagai mitra atau subjek dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan. Untuk itu, pendekatan dapat dilakukan secara partisipatif dan dialogis memadukan pendekatan dari bawah dan dari atas dalam merumuskaan program, pendekatan dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat, dan menggunakan agen pembaharu atau lembaga pendamping.

Istilah pemberdayaan masyarakat terkadang sulit dibedakan dengan penguatan serta pembangunan masyarakat yaitu proses dimana orang-orang itu sendiri disatukan dengan usaha pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, menyatukan masyarakat tersebut ke dalam kehidupan bangsa dan memungkinkan masyarakat menyumbangkan secara penuh bagi kemajuan nasional.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian teori diatas, maka peneliti memberikan kerangka pikir sebagai alur penelitian.



Berdasarkan alur skema diatas dapat digambarkan bahwa fokus utama dari penelitian ini adalah terkait bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkat kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan petani jagung dengan melibatkan petani itu sendiri. Dalam hal ini konsep pemberdayaan yang dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan serta bantuan modal usaha yang tentunya dapat mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Feedback yang diperoleh

masyarakat yaitu pemasukan tambahan pada sektor swasta atau masyarakat setempat yang memiliki lahan perkebunan jagung.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Strauss dan Corbin menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menciptakan kreasi-kreasi tidak mungkin untuk didapatkan melalui cara-cara dengan kegiatan mengukur. Biasanya penelitian kualitatif bisa dipakai pada penelitian yang membahas mengenai kehidupan tiap-tiap individu, masa lalu, perilaku, kelompok, kegiatan bermasyarakat, serta masih banyak lagi.²⁸

Taylor dan Bogdan juga mengemukakan jika penelitian kualitatif adalah bagian dari cara-cara penelitian yang memperoleh informasi seperti hal yang diucapkan maupun di tuliskan, serta tingkah laku dari tiap-tiap individu yang dilihat. Dimana penelitian kualitatif diinginkan bisa menciptakan pemikiran yang baik mengenai tutur kata, catatan, serta tingkah laku yang bisa diperhatikan atau dilihat pada masyarakat, organisasi, individu, serta bagian-bagian khusus pada kondisi yang lengkap dan dicari tahu melalui penglihatan secara penuh, dan sebagainya.²⁹

Sifat pada penelitian yang diteliti adalah penelitian yang akan selesai pada sejumlah responden yang akan diwawancarai secara sistematis. Peneliti akan bertanya kepada responden seputar pertanyaan-pertanyaan yang umum, serta

²⁸V. Wiratna Sujarweni, *metodologi penelitian*, (jl. Wonosari Km.6 Demblaksari Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2020), 19.

²⁹V. Wiratna Sujarweni, *metodologi penelitian*, (jl. Wonosari Km.6 Demblaksari Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2020), 73.

memilih pilihan, masukan dan rasa dalam pemikiran-pemikiran atau pembahasan yang akan dibahas Bersama dimana hal tersebut dilakukan untuk memilih bagaimana penelitian yang akan dituju. Kemudian hasil dari pengetahuan dari penelitian kualitatif ini disesuaikan dengan keahlian, pengetahuan serta persetujuan dari responden yang diwawancarai.

B. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah menegetahui kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan petani jagung dan konsep pemberdayaan dengan memberikan pelatihan dan pembinaan serta bantuann modal usaha terhadap para petani jagung di Desa Tampa, Kabupaten Luwu.

C. Defenisi Istilah

1. Pemerintah

Yang ingin diketahui disini adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan petani jagung pakan ternak atau upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat petani jagung. Adapun pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah daerah dalam hal ini BPP kecamatan Ponrang, kabupaten Luwu dan pemerintah Desa Tampa.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dimaksudkan adalah upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani jagung di Desa Tampa. Adapun pemberdayaan yang dimaksud adalah dengan memberikan

pelatihan atau pembinaan dan bantuan modal usaha yang diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik.

3. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Yang ingin diketahui disini adalah bagaimana tingkat perekonomian masyarakat setelah dilakukannya pemberdayaan. Adapun kesejahteraan ekonomi yang dimaksud adalah berfokus pada pendapatan masyarakat petani dari hasil produksi jagung yang dihitung dalam satu kali panen.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dimana desain penelitian ini merupakan gambaran totalitas perencanaan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mengantisipasi adanya kesulitan yang bisa saja terjadi dalam melaksanakan proses penelitian. Desain penelitian penting dilaksanakan karena termasuk strategi dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan untuk melakukan uji hipotesis atau menjawab segala pertanyaan penelitian.

E. Data dan Sumber Data

Data adalah kumpulan informasi yang didapatkan melalui proses observasi pada suatu objek, sehingga mampu menggambarkan tentang suatu kondisi. Dimana data bisa menjadi penunjuk mengenai suatu informasi. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data pada penelitian ini adalah dari mana data tersebut didapatkan.

Data yang di inginkan pada penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Dimana data primer adalah data yang didapatkan melalui suatu individu

³⁰Samsu, Metode Penelitian: Teori & Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Mixed Methods serta Research & Development, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), 41.

sebagai responden dengan cara kelompok fokus, serta segala hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Dimana data yang didapatkan melalui data primer ini kemudian harus diolah dan disusun Kembali. Serta data sekunder adalah data yang didapatkan melalui tulisan, perbukuan, koran, dan sebagainya.³¹

Adapun data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai bereikut:

1. Data Primer

Data primer adalah yang secara langsung didapatkan dari sumber pertama dengan melalui observasi maupun wawancara kepada para informan. Dimana data primer pada penelitian ini didapatkan dari beberapa informan. Data primer diperoleh dari sumber informasi secara langsung oleg pihak-pihak yang berwenang serta memiliki tanggung jawab mengumpulkan data. Jenis data ini digunakan untuk mendapatkan hasil wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan untuk menjawab masalah dalam penelitian secara khusus. Dalam penelituan ini melibatkan beberapa informan diantaranya BPP Kecamatan ponrang, Pemerintah Desa, dan masyarakat petani jagung di Desa Tampa.

Berikut uraian informan dalam penelitian:

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

	Tuber evi Butta ini oriniani i enemitiani					
No	Nama	Alamat	Pekerjaan			
1	Anwar Apen	Desa parekaju	Ketua BPP kecamatan ponrang			
2	Irmawati S. P	Desa buntu kamiri	Staf BPP			
3	Armin S. P	Desa buntu kamiri	Tim penyuluh pertanian			
4	Tahir. S. Sos	Desa tampa	kepala desa tampa			
5	Yunus S.pdi	Desa tampa	sekretaris desa			
6	Rajiun wiru S.pdi	Desa tampa	ketua BPD			
7	Kaharuddin	Desa tampa	ketua LPM			
8	Sucianto	Desa tampa	ketua kelompok tani			

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 15.

9	Marten	Desa tampa	petani jagung
10	Ical	Desa tampa	petani jagung
11	Memet	Desa tampa	petani jagung
12	Burhan	Desa tampa	petani jagung
13	Muh. Ikbal	Desa tampa	petani jagung
14	Cakke	Desa tampa	petani jagung
15	Haruna	Desa tampa	petani jagung

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan terlebih dahulu serta dilaporkan oleh orang diluar peneliti, meskipun data yang dikumpulkan sebelumnya merupakan data yang asli. Dan data sekunder juga dapat dikatakan sebagai data yang didapatkan melalui sumber yang kedua, selain dari yang diteliti dengan tujuan untuk memberikan dukungan penelitian yang dilaksanakan. Data primer yang telah diperoleh tidak lagi diragukan karena juga sudah mendapatkan dukungan dari data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu data berupa dokumentasi, dokumen, data-data berkaitan penelitian yang dilaksanakan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan data atau informasi dari para informan, seperti wawancara, catatan, rekam suara, dan lain-lain. Dimana instrumen pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, dengan menggunakan teknologi tape recorder. Human Instrument memiliki fungsi sebagai penentu fokus penelitian, memilih informan contohnya sumber data, pemungutan data melalui kualitas data, analisis data, penjabaran data, dan penarikan kesimpulan³²

³²Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D, (Bandung: CV.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan informasi penulisan, maka peneliti memakai tiga cara, diantaranya terdiri dari:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam menggali informasi dengan cara melakukan penelitian berdasarkan apa yang dilihat melalui pengamatan. Observasi sebagai sarana dalam mengumpulkan informasi sangat banyak digunakan dalam melihat segala aktivitas yang dilakukan oleh individu.³³ Dimana peneliti dapat memperoleh data ketika berkunjung pada tempat tersebut dapat mengetahui lebih jelas mengenai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan petani jagung pakan ternak.

Pengertian observasi menurut Sutrisno Hadi adalah cara yang memiliki sifat yang sangat lengkap, terdiri dari beberapa proses biologis dan psikhologis.³⁴ Cara pengumpulan informasi melalui observasi ini digunakan Ketika peneliti tertarik pada aktivitas setiap individu, cara kerja, fenomena-fenomena lingkungan serta Ketika responden yang diperhatikan tidak begitu luas.

Dilihat dari cara pelaksanaan pengumpulan informasi, observasi bisa dibedakan menjadi dua, diantaranya observasi yang berperan serta observasi yang tidak ikut berperan, yang selanjutnya observasi dilihat dari aspek perlengkapan

Alfabeta, 2018), 222

³³Effi Aswita Lubis, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Medan: Unimed Press, 2012), 46. ³⁴Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, No.1 (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

yang digunakan. Observasi bisa dibagi menjadi dua, yaitu observasi yang terarah dan observasi tidak terarah. Dan observasi yang dilakukan oleh peneliti ini adalah observasi yang terarah. Dikatakan demikian karena observasi yang dilakukan oleh peneliti sudah disusun dengan sebaik-baiknya, mengenai apa yang dilihat serta dimana lokasinya.

Dimana pada tahap observasi ini peneliti melihat jika kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesjahteraan ekonomi melalui pemberdayaan petani jagung pakan ternak.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah cara yang digunakan pada saat mencari informasi melalui tanya jawab langsung kepada responden atau individu oleh peneliti, dimana setiap pernyataan dari responden tersebut di tulis oleh peneliti. Dimana wawancara dilakukan ketika peneliti melaksanakan studi pendahuluan agar bisa mendapat topik-topik yang akan diteliti, dan juga ketika peneliti ingin mencari tahu sesuatu pada responden lebih dalam serta jumlah respondennya hanya sedikit. Wawancara adalah bentuk metode dalam memperoleh informasi dengan maksud tertentu. 36

Kegiatan wawancara bisa dilakukan dengan cara terarah maupun tidak terarah serta mampu dilakukan dengan cara bertatap muka maupun menggunakan media komunikasi lainya. Dan peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan

³⁶Amirul Hadi dan Hariyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan untuk Iain dan Ptain Semua Jurusan Komponen Mkk*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 47.

 $^{^{35}}$ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, No.1 (Bandung: Alfabeta, 2018), 145.

cara terarah, dimana hal ini digunakan Ketika peneliti tahu tentang data apa yang akan didapatkan nantinya.³⁷

Dalam hal ini pewawancara melakukan kegiatan wawancara langsung dengan terwawancara agar memperoleh informasi yang akurat dengan alat bantu seperti handphone untuk melakukan rekaman mengenai pembicaraan antara pewawancara denga terwawancara. Adapun terwawancara yang dimaksud disini adalah baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi melalui penggalian, penentuan, pembuatan, serta penyimpanan data baik berupa foto, tulisan-tulisan, serta pengetahuan-pengetahuan lainya. Dimana dokumentasi bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah manusia karena pemeriksaanya adalah keabsahan data. Dimana dalam melakukan uji kredibilitas data penelitian, dilakukan dengan menggunakan uji triangulasi. Menurut William pada Sugiyono, triangulasi adalah pemeriksaan data melalui beberapa sumber dengan menggunakan berbagai teknik dan juga waktu.

Teknik triangulasi digunakan dalam menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah didapatkan dari berbagai sumber. Yang kemudian melakukan penyaringan data

³⁷Sugiyono, *metode penelitian* bisnis (Gegerkalong Hilir No. 48 Bandung: Alvabeta, cv, 2017), 220-229.

dengan cara menyilangkan data atau informasi agar data yang dipunya dapat lebih lengkap serta sesuai dengan apa yang diinginkan. ³⁸Setelah peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian data dari hasil penelitian ini disatukan untuk dapat saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

I. Teknik Analisis Data

Penjabaran data yang didapatkan kemudian dikelola dan ditinjau secara kualitatif dengan memakai cara-cara analisis seperti:

a. Reduksi Data

Mereduksi data, maksudnya adalah membuat rangkuman, menentukan sesuatu yang penting, berfokus pada segala sesuatu yang utama, mencari tema serta motifnya dan tidak mengambil hal-hal yang tidak penting. Dengan demikian, data yang sudah direduksi mampu menghasilkan gambaran yang pasti, dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya, serta mencarinya jika dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Maksudnya adalah menyediakan data yang banyak dan di rancang rapi yang memungkinkan tebentuknya hasil dan Tindakan yang diambil. Penyajian data yang umumnya dipakai pada penelitian kualitatif adalah dalam bentuk deskripsi.

³⁸Sugiyono, Metode Penelitian Usaha, (Bandung: Alfabeta, 2017), 518-520.

c. Penarikan Kesimpulan

Aktivitas terakhir yaitu membuat hasil akhir dari beberapa proses menggali informasi, penulis Menyusun dari mengartikan motif-motif pemaparan, dan sebagainya.³⁹



-

 $^{^{39}} Sugiyono,$ Metode Penelitian & dan Pengembangan Research and Development/ R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 369-375.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Profil Desa

Pada awalnya desa Tampa adalah gabungan dari desa Mario yang pada saat itu di pimpin oleh kepala desa Bapak Andi Kira pada tahun1973-1997. Barulah ditahun 1997 terbentuk desa Tampa yang di pimpin oleh Andi kira. Desa Tampa adalah salah satu Desa yang terdapat di Kabupaten Luwu yang terbagi menjadi 4 dusun yaitu:

- a. Dusun Bakka
- b. Dusun Tampa
- c. Dusun Pagerengan

d. Dusun Passapa

Desa Tampa juga merupakan salah satu dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Ponrang yang memiliki luas wilayah: ±28.763 Hektar.

Adapun batas-batas wilayah desa Tampa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Desa Lare-lare
- b. Sebelah Selatan: Desa Tampumia
- c. Sebelah Timur: Desa Parekaju
- d. Sebelah Barat: Desa malenyong

Berikut adalah data kelompok tani jagung di DesaTampa:

Tabel. 4.1 Data Kelompok Tani Jagung

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Petani
1	Pelita Jaya	17 Petani
2	Tenda Biru	33 Petani
3	Harapan	22 Petani
4	Wando Romeng	17 Petani

secara umum keadaan topografi Desa Tampa adalah dataran tinnggi dan juga dataran rendah yang lahannya digunakan sebagai tempat pemukiman penduduk serta lahan pertanian dan perkebuan, selebihnya adalah fasilitas umum. Iklim di Desa Tampa sebagaimana Desa-Desa/Kelurahan-Kelurahan lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan penghujan.

Secara geografis, desa Tampa memiliki keunggulan tertentu karena adanya potensi sumber daya alam berupa lahan perkebunan yang bisa dimanafaatkan oleh masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan atau mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya potensi tersebut, jika dibarengi dengan adanya pemberdayaan dari instansi terkait, tentu akan sangat membantu masyakarat khususnya para petani.

Sebagian besar masyarakat didesa Tampa memiliki mata pencaharian yang bergerak di sektor pertanian. Selain karena tertabatasnya lapangan pekerjaan. Hal ini dilatarbelakangi karena sebelum masyarakat membudidayakan tanaman

jagung, mata pencaharian masyarakat adalah di bidang perkebunan cengkeh. namun karena masyarakat merasa bahwa sektor ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga masyarakat mulai membudidayakan tanaman jagung selama kurang lebih dua tahun terakhir.

Berikut adalah data jumlah penduduk desa Tampa:

Laki-Laki	Perempuan	Total
452	479	931

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa Tampa, sebagaimana diatur dalam surat keputusan kepala Desa tentang pengangkatan aparat Desa dalam memberi tugas pokok dan fungsi kepada masing-masing aparat desa sesuai dengan batas kewenangannya serta selalu melakukan dengan kepala Desa. Saatsaat tertentu dalam penyelenggaraann Pemerintahan, senantiasa melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan kaum perempuan dalam musyawarah untuk pengambilan keputusan.

Adapun visi desa Tampa adalah" **Terbangunnya tata kelola** pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang Adil, Makmur dan Sejahtera".

Sejalan dengam visi yang telah di tetapkan dengan memperhatikan kondisi obyektif yang dimiliki oleh desa Tampa, dirumuskan dengan misi sebagai berikut.

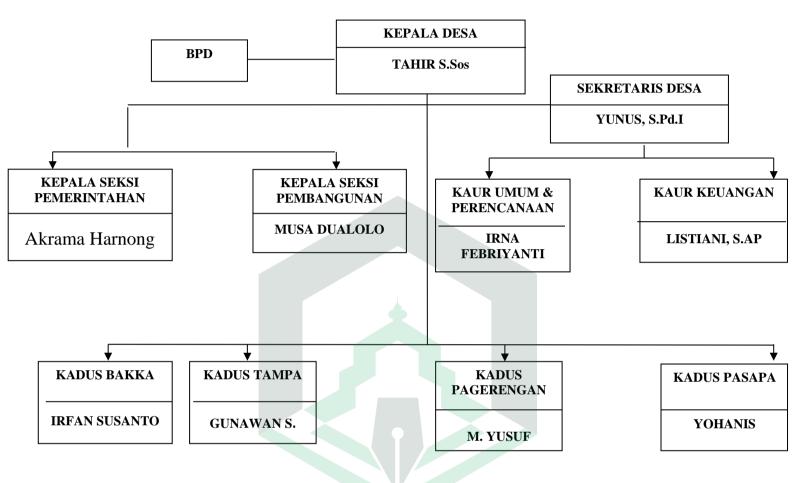
- a. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewangan lainnya.

- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dengan mengedepankan musyawarah mufakat berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- d. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada Ukm. Wiraswasta dan petani
- e. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan non formal, kesehatan dan kebudayaan desa.⁴⁰

40Laporan Penyelenggaraan Desa (LPPD) Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu 2021

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tampa

BAGAN PEMERINTAHAN DESA TAMPA



Gambar 4.1 Struktur Desa Tampa

C. Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa Tampa

Mayoritas mata pencaharian pemduduk didesa Tampa bergerak di sektor pertanian. salah satu permasalahan yang paling mendasar terkait dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang tidak sejalan dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten Luwu. Dalam pembangunan desa, hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan modal dan falilitas sebagai modal bagi masyarakat kuhususnya para petani jagung dalammeningkatkan hasil produksi pertaniannya. tingkat kemiskinan didesa Tampa yang terbilang tinggi mengharuskan masyarakat desa Tampa untuk mencari peluang usaha dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Berikut adalah uraian mengenai kesejahteraan masyarakat dan mata pencaharian.

No	Kelompok Usia	Jumlah
1	Keluarga Prasejahtera	226
2	Keluarga Sejahtera 1	7
3	Keluarga Sejahtera 2	-
4	Keluarga Sejahtera 3	-
5	Keluarga Sejahtera 3 Plus	-
	Total	233

Tabel 4.3 Kesejahteraan masyarakat

Sektor Mata Pencaharian	Jumlah
Pertanian	769 orang
Peternakan	50 orang
Pedagang	9 orang
ASN	7 orang
Pertambangan dan Bahan Galian C	1 Orang
Buruh	25 Orang

Tabel 4.4 struktur mata pencaharian menurut sektor

Jika dilihat dari potensi sumber daya alam yang ada didesa Tampa sangat mendukung dalam mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya di bidang pertanian jagung maupun di bidang sosial budaya. Oleh karena itu, pembanagunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan juga diharapkan berdampak positif pada perubahan sosial dan ekonomi masyarakat yang seimbang sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik. Pengelolaan sarana dan prasana adalah tahap yamg dilakukan secara berkelanjutan dimulai dengan proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan antara masyarakat dan pemerintah agar dapat menghasilkan keputusan yang rasional yang adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembanguan masyarakat serta mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam meningkatkan perekonomiannya.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai kesuksesan adalah dalam tahapan ini adalah:

- 1) Pemberdayaan masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan.
- 2) Adanya perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat juga mampu membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk menunjang sumber daya dalam rangka melaksanaan proses pembangunan.
- Kompetensi pemerintah daerah maupun pemerintah desa meningkat sehingga lebih optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat,

antara lain menyediakan fasilitas, modal dan pendampingan ke seluruh elemen masyarakat.

4) Adanya fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan sehingga masyarakat mampu membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang dimiliki dalam melaksanan proses pembangunan.⁴¹

D. Konsep Pemberdayaan Petani Jagung

1. Pendidikan dan Pelatihan

Kebijakan pemerintah dalam pendidikan dan pelatihan adalah menggerakkan partisipasi multipihak dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat. Dimana kegiatan ini melibatkan tiga pihak diantaranya BPP kecamatan ponrang, pemerintah desa, dan masyarakat petani jagung. Dalam hal ini, pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat petani.

Dalam rangka memberikan pelatihan, pembimbingan dan pengarahan yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan balai penyuluhan untuk meningkatkan, pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi masyarakat petani maka dilkakukanlah yaitu penyuluhan melalui pelatihan dan arahan kapan saja.

Peran pemerintah daerah dalam hal ini BPP kecamatan Ponrang sebagain pelaksana memberikan penyuluhan pertanian langsung terjun ke masyarakat yang ada didesa Tampa. Dalam pelaksanaannya, tentunya diharapkan menimbulkan

 $^{^{41}\}mbox{Laporan}$ Penyelenggaraan Desa (LPPD) Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu 2021

kesadaran dan partisipasi warga setempat yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan ekonomi didaerah tersebut terutama pada sektor pertanian.

Dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan petani jagung maka perlu perbaikan sarana dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera. Maka dari itu, pemerintah harus bekerja secara maksimal sehingga dalam meningkatkan partisiasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan tergantung pemimpin yang didaerah tersebut.

BPP kecamatan ponrang yang bekerja sama dengan pemerintah desa Tampa dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat petani yaitu dengan cara mengumpulkan masyarakat petani jagung yang ada di desa Tampa untuk memberikan pengertian tentang kegiatan apa saja yang perlu dilaksanakan di lapangan. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak "Armin, SP" selaku tim penyuluh pertanian didesa Tampa yang menyatakan bahwa:

"Saya selaku penyuluh yang ditugaskan didesa Tampa bertindak untuk memberikan arahan dan bimbingan terhadap para petani jagung mulai dari proses penanaman hingga pasca panen. Dalam hal ini kami memberikan arahan dengan menggerakkan masyarakat ikut dalam sosialisasi yang diadakan. Selain itu, biasanya kami langsung terjun ke lapangan memberikan arahan kepada masyarakat. Tentunya bahwa saya akan terus memantau masyrakat dalam kegiatan pemberdayaan petani ini". ⁴²

Hal serupa disampaikan oleh bapak "Sucianto" sebagai ketua kelompok tani Pelita Jaya dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

"Dengan adanya pelaksanaan dan pelatihan tersebut, kami selaku kelompok tani mengikuti kegiatan tersebut. Tentunya bahwa dengan adanya kegiatan ini kami mendapatkan pengetahuan tentang cara memelihara tanaman jagung mulai dari proses penanaman hingga tiba

_

 $^{^{42}\}mbox{Wawancara}$ Bapak Armin SP Selaku Tim Penyuluh Pertanian. Di Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. 28 Mei 2022.

masa panen agar hasil panen yang didapatkan berkualitas. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak berpartipasi dalam kegiatan pelatihan ini dan hanya diikuti oleh segelintir orang saja".⁴³

Sedangkan menurut bapak "Muh. Ikbal" selaku masyarakat petani dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

"Memang benar bahwa tim penyuluh telah memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat petani jagung baik itu melalui sosialisasi atau langsung terjun ke lapangan memberikan arahan kepada masyarakat. Namun yang menjadi kendala adalah pelatihan atau sosialisasi tersebut hanya diikuti oleh segelintir orang saja. Masih banyak masyarakat belum ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut".44

Berdasarkan ketiga wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah berperan aktif dalam pemberdayaan petani jagung dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tercermin melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga bentuk kebijakan pemerintah daerah (BPP kecamatan Ponrang) dan pemerintah desa Tampa dalam hal pelaksanaan pelatihan meliputi penyuluhan langsung ke lapangan atau melalui sosialisasi pertanian agar dapat menambah pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat dalam mengelola pertaniannya. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak "Yunus, S. Pdi" selaku sekretaris desa dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

"Tentunya bahwa kami sebagai aparat desa akan terus berupaya dalam membantu para petani. Kami akan terus bekerja sama tim penyuluh dalam memberdayakan petani jagung di desa Tampa melalui pendidikan dan pelatihan agar pengetahuan, sikap dan keterampilan petani terus bertambah sehingga dapat mengelolah pertaniannya dengan baik dan benar serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya sesuai yang kita harapkan. Untuk itu, kedepannya masyarakat harus ikut berperan aktif dan antusias

⁴⁴Wawancara Bapak Muh. Ikbal Selaku Masyarakat Petani.Di Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. 28 Mei 2022.

⁴³Wawancara Bapak Sucianto Selaku Ketua Kelompok Tani Pelita Jaya. Di Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. 28 Mei 2022.

dalam mengikuti pelatihan ini".45

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat petani jagung akan terus diupayakan dan dipantau oleh pemerintah dan tim penyuluh. Pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah tentu sangat berarti bagi masyarakat petani dalam mengelolah pertaniannya. tentunya bahwa dengan mengikuti arahan tim penyuluh dan pemerintah akan sangat menentukan kemajuan pertanian didesa Tampa.

2. Bantuan modal usaha

Selain pendidikan dan pelatihan, pemerintah juga memberikan pemberdayaan melalui bantuan modal usaha. Dalam hal ini kebijakan pemerintah adalah menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelakanaan pembagunan di dearah. Pemerintah desa Tampa dan BPP kecamatan Ponrang berusaha memfasilitasi masyarakat petani akan produksi pertanian semakin meningkat sebagaimana yang diharapkan. Berbicara mengenai lokasi yang tetap maka upaya ini dekat dengan aspek intensifikasi pertanian dimana hal ini merupakan kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas bertani dengan berbagai sarana dan prasana untuk meningkatkan hasil pertanian sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Pemerintah desa Tampa dan BPP kecamatan Ponrang memberikan bantuan modal usaha berupa benih/bibit kepada masyarakat petani. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu anggota BPP kecamatan ponrang yang bernama ibu "Irmawati, SP" dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

⁴⁵Wawancara Bapak Yunus S. Pdi Selaku Sekretaris Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. 23 Mei 2022.

"Kami dari pihak BPP kecamatan Ponrang memberikan dalam penberdayaan petani jagung khususnya didesa Tampa melalui bantuan modal usaha memberikan barang berupa benih/bibit kepada masyarakat petani jagung agar dapat sejahtera. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan para petani".⁴⁶

Hal serupa disampaikan oleh kepala desa Tampa dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

"Kami selaku pemerintah desa juga ikut berperan dalam memberikan bantuan modal berupa bibit/benih kepada masyarakat. Tentunya kami juga bekerja sama dengan pihak BPP kecamatan Ponrang. Selain bantuan bibit, kami juga memfasilitasi masyarakat mesin penggiling (doros) yang dikelola oleh BUMDES agar memudahkan petani pada saat setelah panen. Untuk itu, kami selaku pemerintah desa mengarahkan masyarakat agar selalu aktif untuk ikut dalam sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah desa. Dengan ini masyarakat petani bisa menyampaikan apa yang mereka butuhkan dalam mengelola pertaniannya". ⁴⁷

Dari kedua hasil wawancara diatas maka dapat disimpilkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung pemerintah desa dan BPP kecamatan Ponrang telah memberikan bantuan modal berupa modal berupa benih/bibit akan tetapi belum optimal dilaksanakan karena masih banyak masyarakat petani didesa Tampa belum mendapatkan bantuan tersebut. Selain bantuan bibit/benih pemerintah desa juga menyiapkan alat mesin penggiling (doros) yang dikelola oleh BUMDES agar dapat memudahkan masyarakat pada saat panen.

Setiap kegiatan tersebut tentu tidak terlepas dari bantuan yang sediakan oleh pemerintah demi memudahkan jalannya proses produksi hingga pasca produksi. Bantuan yang dimaksud adalah bantuan alat mesin penggiling. Tentunya bahwa dengan penggunaan alat mesin penggiling diharapkan terjadinya

_

⁴⁶Wawancara Ibu Irmawati SP. Selaku Anggota BPP Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Di Desa Tampa 19 Mei 2022.

⁴⁷Wawancara Bapak Tahir S. Sos Selaku kepala Desa Tampa. 27 Mei 2022.

efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi hingga pasca produksi sehingga hasil yang didapatkan petani pun dapat meningkatkan produksi sehingga taraf perekonomiannya juga ikut meningkat. Dengan adanya bantuan modal dan alat mesin maka pertanian dalam suatu daerah akan semakin berkembang. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat petani yang bernama "Memet Hasanuddin" dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

"Bantuan modal yang diberikan pemerintah melalui BPP kecamatan Ponrang yaitu bantuan benih akan tetapi tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan tersebut. Selain bantuan benih, pemerintah desa juga meemberikan fasilitas berupa alat mesin penggiling (doros) tetapi tidak semua masyarakat menggunakan fasilitas tesebut".⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah berupa benih dan alat mesin telah terealisasi akan tetapi belum semua masyarakat mendapatkan dan menikmati fasilitas tersebut. Sedangkan menurut "Sucianto" salah ketua Kelompok Tani Pelita Jaya (KTPJ) dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

"Memang benar bahwa pemerintah desa dan BPP kecamatan Ponrang memberikan modal berupa benih berupa Hebrida. Namun hambatan yang dialami petani adalah benih yang diberikan tidak sesuai dengan harapan petani dan lebih memilih untuk membeli benih di Toko-toko pertanian". 49

Berdasarkan pernyataandiatas dapat disimpulkan bahwa bantuan benih yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang diharapkan petani. Hal ini sebabkan karena benih yang diberikan oleh pemerintah adalah benih kualitasnya terbilang biasa saja sehingga sebagian masyarakat petani jagung lebih

_

⁴⁸Wawancara Bapak Memet Hasanuddin Selaku Masyarakat Petani Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. 28 Mei 2022.

⁴⁹Wawancara Bapak Sucianto Selaku Kelompok Tani Pelita Jaya Di Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. 28 Mei 2022.

memilih untuk membeli benih yang diinginkan. Sedangkan menurut kepala desa Tampa dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

"Bantuan benih yang pemerintah berikan adalah jenis hebrida. Tentunya bahwa dengan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu para petani. Namun jika tidak sesuai dengan keinginannya, kami menyarankan kepada masyarakat petani untuk menyampaikan kepada pemerintah terkait dengan apa yang mereka butuhkah. Kami selaku pemerintah desa akan terus mengusahakan apa yang masyarakat inginkan. Untuk itu kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Tampa khususnya petani jagung agar selalu aktif dalam mengikuti sosialisasi atau musyawarah yang diadakan oleh pemerintah setiap pekan. Dengan ini masyarakat bisa menyampaikan benih apa yang mereka inginkan". 50

Berdasarkan pernyataan diatas maka disimpulkan bahwa pemerintah akan terus berupaya dalam memberikan bantuan benih sesuai kebutuhan masyarakat petani. Artinya bahwa, dalam hal ini perlu ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu pemerintah harus lebih aktif dalam menggerakkan kesadaran masyarakat agar pemberdayaan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.

E. Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan dan serangkaian tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau respon terhadap suatu keadaan krisis. Artinya bahwa kebijakan pemerintah mempunyai ukuran dari tindakan tertentu dalam waktu tertentu pula untuk menjawab/memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, kebijakan juga merupakan suatu keputusan yang dibuat dengan cara sistematik oleh pemerintah itu sendiri

 $^{^{50}\}mbox{Wawancara}$ Bapak Tahir S. Sos Selaku Kepala Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. 29 Mei 2022.

dengan maskud dan tujuan demi kepentingan dan kemaslahatan publik.

Menurut **UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 bahwa pemberdayaan masyarakatdesa ialah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan peengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan ssumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa.

Berbagai macam upaya dan strategi yang telah diuraikan dalam kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan untuk memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka memenuhi kesejahteraan ekonominya. Pemberdayaan masyarakat khususnya petani jagung dapat diusahakan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi serta berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Konsep strategi pembangunan berimbang yaitu pembangunan disektor pertanian khususnya petani jagung merupakan tujuan pembangunan yang paling ideal. Pada faktanya konsep strategi pembangunan berimbang tidak dapat dilakukan dinegara berkembang, hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang tidak memadai untuk melakukan pembangunan di bidang pertanian.

Pemerintah dalam hal ini Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kecamatan Ponrang yang bekerja sama dengan pemerintah desa Tampa terkait dengan pemberdayaan masyarakat memberikan arahan kepada tim penyuluh disetiap desa berdasarkan tugas dan fungsinya setiap saat dapat melakukan pelaksanaan pelatiahan terhadap masyarakat khususnya petani jagung kapan dan dimana saja. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala BPP Kecamatan Ponrang yang bernama "Anwar Apen" menyatakan bahwa:

"Kebijakan pemerintah dalam hal ini BPP Kecamatan ponrang dalam pemberdayaan petani jagung khususnya didesa Tampa telah memberikan bantuan modal usaha berupa benih/bibit dan memberikan arahan terakit pertanian tersebut dengan mengirim tim penyuluh untuh mengarahkan para petani mulai dari cara memelihara tanaman jagung dan mengelola tanah agar tetap subur serta bagaimana memperoleh hasil panen disetiap musimnya".⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan petani jagung didesa Tampa, pemerintah dalam hal ini BPP kecamatan Ponrang memberikan bantuan benih dan mengirim penyuluh pertanian ke masyarakat petani jagung didesa Tampa.

Selain BPP kecamatan Ponrang, tentu pemerintah desa juga ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung. Sebagaimana wawancara penulis dengan kepala desa Tampa yang bernama "Tahir, S.sos" menyatakan bahwa:

"Kami selaku pemerintah desa tentu turut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat khususnya petani jagung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Dalam hal ini, pemerintah desa melakukan kerja sama dengan BPP kecamatan Ponrang untuk mendatangkan penyuluh pertanian untuk memberikan arahakan kepada masyarakat. Kami selaku pemerintah desa juga menyampaikan kepada penyuluh untuk selalu

⁵¹Wawancara Bapak Anwar Apen Selaku Kepala BPP Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Di Desa Tampa. 19 Mei 2022.

hadir dalam memberikan pendampingan kepada petani jagung yang di Desa Tampa. Pemerintah desa juga turut mendampingi masyarakat secara bergotong royong menanam jagung. Kami juga menyediakan mesin penggiling (doros) yang dikelola oleh BUMDES untuk memudahkan masyarakat setelah panen".⁵²

Hal serupa disampaikan oleh bapak "Kaharuddin" selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

"Seperti yang telah disampaikan oleh kepala desa bahwa dalam rangka melaksanakan pemberdayaan petani jagung di Desa Tampa, pemerintah desa bekerja dengan BPP kecamatan Ponrang untuk memberikan pelatihan ataupun pembinaan dan juga bantuan modal usaha berupa benih/bibit kepada masyarakat petani jagung di Desa Tampa. Dalam hal ini pemerintah memberikan pembinaan dengan mendatangkan penyuluh untuk memberikan arahan terhadap para petani dalam membudidayakan tanaman jagung.⁵³

Dari ketiga hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat petani jagung khususnya didesa Tampa telah dilakukan oleh pemerintah bagi masyarakat dalam meningkatkan hasil produksi dan keterampilan para petani dalam mengelolah pertaniannya. Melalui kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah desa masyarakat akan lebih mengerti tentang cara-cara budidaya tanaman jagung yang baik karena dengan adanya peran pemerintah itu sangat menentukan kesejahteraan masyarakat di Desa Tampa.

Pelaksanaan tugas dan fungsi seorang pemerintah merupakan salah bentuk kegiatan aparat pemerintahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagaimana tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi mengenai pelaksanan fungsi tersebut.

⁵²Wawancara Bapak Tahir S.sos. Selaku Kepala Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.27 Mei 2022.

⁵³Wawancara Bapak Kaharuddin Selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Di Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. 27 Mei 2022.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri
- 2. Menggerakkan partisipasi masyarakat
- 3. Melaksanakan tugas dari pemerintah diatasnya
- 4. Keamanan dan ketertiban masyarakat

Maka dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pemerintah setempat harus megusahakan:

- a. Terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat
- b. Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan pembangunan setempat
- c. Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronasi, dan integrasi secara lintas sektor
- d. Terselenggaranya program yang berkelanjutan
- e. Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan ketua BPD desa Tampa yang berinisial "RW" menyatakan bahwa:

"Kami selaku BPD Desa Tampa akan terus mengupayakan agar tetap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya petani jagung. Kami juga akan menampung aspirasi m asyaarakat terkait dengam kebutuhannya agar kami usulkan ke pemerintah. Kami akan terus nelakukan pendataan terkait dengan kebutuhan masyarakat petani". ⁵⁴

_

⁵⁴Wawancara Bapak Rajiun Wiru Selaku Ketua BPD di Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. 27 Mei 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah (UU nomor 06 tahun 2014) telah di implementasikan oleh pemerintah Tesa Tampa.

F. Perekonomian Masyarakat Petani Jagung

Keterlibatan pemerintah dalam pemberdayaan petani jagung di Desa Tampa melalui pendidikan dan pelatihan langsung ke masyarakat dan juga memberikan bantuan modal berupa benih/bibit serta alat mesin penggiling (doros) tentu akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak "Muh. Iqbal" dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

"Dengan adanya bantuan dan bimbingan dari pemerintah dan Tim penyuluh tentu kami sangat bersyukur dan terbantu. Saya untuk tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli benih karena pemerintah sudah menyediakan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas berupa alat mesin penggiling (doros) sehingga dapat memudahkan saya maupun petani lainnya pada saat tiba masa panen". 55

1. Data Pendapatan Masyarakat

Adanya pelatihan dan pembinaan serta bantuan beruba benih dan juga alat mesin penggiling yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat petani jagung didesa Tampa membuat taraf perekonomian masyarakat mengalami sedikit perubahan namun tidak begitu signifkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Memet dalam wawancarana menyatakan bahwa:

"Saya sedikit mengalami sedikit peningkatan dalam perekonomian setelah mengikuti arahan dan pendampingan dari penyuluh dan pemerintah. Saya mengikuti sebagaian saran yang disampaikan oleh pemerintah misalnya bagaimana cara pengolahan tanah yang baik, bibit yang unggul dan cara memelihara tanaman jagung dengan baik dan benar sehingga hasil yang kami dapatkan setelah panen sedikit mengalami peningkatan. Selain arahan dan pendampingan, pemerintah desa juga memberikan fasilitas alat

⁵⁵Wawancara Bapak Muh. Ikbal Selaku Masyarakat Petani Ketua di Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. 28 Mei 2022.

mesin penggiling sehingga dapat memudahkan akses bagi kami pada saat setelah panen".⁵⁶

Setelah adanya arahan dan pendampingan dan bantuan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini BPP kecamatan Ponrang dan pemerintah desa Tampa maka diperoleh data pendapatan masyarakat petani. Untuk melihat pengaruh kebijakan pemeritah tersebut pada pendapatan masyarakat petani maka dapat dilihat dari pendapatan sebelum dan setelah adanya pendidikan dan pelatihan dan ditinjau berdasarakan hasil yang di peroleh masyarakat petani dalam satu kali panen. Adapun data pendapatan masyarakat petani sebagai berikut:

Tabel 4.5 Data pendapatan masyarakat petani sebelum dan sesudah pelatihan

NO	Nama	Luas lahan	Sebelum	Sesudah	
1	Sucianto	1.00 ha	Rp.15.000.000	Rp.18.000.000	
2	Marten	1.00 ha	Rp.13.000.000	Rp.16.500.000	
3	Ical	1.00 ha	Rp.14.500.000	Rp.17.500.000	
4	Memet	1.00 ha	Rp.13.000.000	Rp.16.500.000	
5	Burhan	1.00 ha	Rp.13.500.000	Rp.17.000.000	
6	Oddan	0,50 ha	Rp. 6.000.000	Rp. 8.500.000	
7	Cakke	0.50 ha	Rp. 6.500.000	Rp. 9.000.000	
8	Haruna	0.50 ha	Rp. 6.000.000	Rp. 8.500.000	
9	Ramla	0.50 ha	Rp. 5.500.000	Rp. 7.500.000	
10	Limung	0.50 ha	Rp. 6.000.000	Rp. 8.500.000	
11	M.Iqbal	0.50 ha	Rp. 6.000.000	Rp. 8.500.000	
12	A.m Calik	0.50 ha	Rp. 6.500.000	Rp. 9.000.000	
13	Sangakala	0,50 ha	Rp. 6.000.000	Rp. 8.500.000	
14	Fatimah	0.50 ha	Rp. 5.500.000	Rp. 7.500.000	
15	Surianti	1.00 ha	Rp.14.000.000	Rp.17.000.000	

Dengan adanya kebijkan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan petani jagung di Desa Tampa terjadi peningkatan perekonomian atau pendapatan masyarakat setempat, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa taraf perekonomian atau pendapatan masyarakat

⁵⁶Wawancara Bapak Memet Selaku Masyarakat Petani Di Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. 28 Mei 2022.

sebelum dilaksanakannya pemberdayaan petani jagung sekitar Rp.6.000.000/panen jika luas lahan 0.50 ha dan jika luas lahan 1.00 ha maka hasil yang didapatkan sekitar 13.000.000/panen.

G. PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa mayoritas penduduk di Desa Tampa memiliki mata pencaharian yang bergerak disektor pertanian. Selain karena tertabatasnya lapangan pekerjaan Hal ini dilatarbelakangi karena sebelum masyarakat membudidayakan tanaman jagung, mata pencaharian masyarakat adalah dibidang perkebunan cengkeh. namun karena masyarakat merasa bahwa sektor ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga masyarakat mulai membudidayakan tanaman jagung selama kurang lebih dua tahun terakhir.

Kemajuan suatu daerah bergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerag itu sendiri, dimana potensi tersebut dapat dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Besarnya ketimpangan sosial yang terjadi diberbagai daerah diakibatakan karena kurangnya perhatian pemerintah daerah sehingga masyarakatnya mengalami keterbatasan hidup. Keterbatasan tersebut bersumber pada lemahnya potensi manusia dan kurangnya dukungan lingkungan dalam memanfaatkan potensi alam yang sumber daya yang tersedia.

Dengan keadaan tersebut tentu perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan melihat yang tidak tertangani langsung oleh pemerintah ada separuh bidang yang harus menyangkut tenaga kerja secara meningkat dengan tingkat pendapatan yang

rendah dan ada juga separuh masyarakatnya yang tidak ikut serta dalam cara pembangunan sehingga tidak dapat merasakan hasil yang maksimal.

Dalam pembangunan desa hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan usaha untuk perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan modal ataupun fasilitas serta pengembangan potensi sumber daya manusia masyarakat desa sebagai modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani jagung yang ada didesa Tampa. Tingkat kemiskinan didesa Tampa terbilang masih tinggi menjadikan masyarakat desa Tampa mencari peluang lain yang dapat menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya petani jagung.

Menurut **UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 bahwa pemberdayaan masyarakatdesa ialah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan peengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan ssumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa.

Peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pemerintah yang memiliki kewenangan dan kedudukan yang sangat strategis dimana hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pelayan publik guna

meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketentraman bagi masyarakat. Sebab, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini dimulai dari tahapantahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, untuk memanfaatkan dan mengalokasikan berbagai sumber daya yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan petani jagung didesa Tampa, yaitu sebagai fasilitior yang menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat petani agar dapat menccapai tujuannnya. Dalam hal ini pemerintah menyediakan fasilitas berupa pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat serta bantuan modal usaha berupa benih/bibit dan alat mesin penggiling (doros).

Dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di Desa Tampa pemerintah desa dan BPP kecamatan Ponrang melakukan pelatihan atau pembinaan dengan cara terjun langsung ke lapangan mendampingi dan mengarahkan masyarakat petani jagung tentang bagaimana cara pengolahan tanaman jagung dengan baik dan benar. Selain itu pemeriintah desa juga selalu mengajak masyarakat untuk selalu hadir dalam musyawarah yang diadakan oleh pemerintah desa setiap minggunya agar masyarakat bisa menyampaikan kebutuhannya. Selain pelatihan, pemerintah juga memberikan bantuan benih/bibit dan alat mesin penggiling yang dikelola oleh BUMDES untuk membantu

masyarakat dalam menglola produksi pertaniannya.

Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai bentuk upaya dalam memberdayakan masyarakat petani jagung agar dapat menambah pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat petani sehingga kesejahteraan ekonomi didesa dapat diwujudkan. Menurut kepala BPP kecamatan Ponrang salah satu hal yang menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan pemberdayaan didesa Tampa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik itu dibidang perekonomian dan juga pendidikan. Hal yang menjadi faktor pendukung adalah potensi sumber daya lokal berupa lahan perkebunan di Desa Tampa sehingga pemerintah dalam hal ini BPP kecamatan Ponrang yang bekerja sama dengan pemerintah desa melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat agar menambah keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya tersebut sehingga menghasilkan prooduksi jagung yang baik dan bermutu serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat didesa Tampa.

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi untuk melaksanan pembangunan dimana segala upaya diarahkan untuk keperluan masyarakat termasuk pemberdayaan petani jagung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani jagung didesa Tampa yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemberdayaan dilakukan melalui partisipasi masyrakat dan pendampingan dari pemerintah atau lembaga tertentu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengelola pertaniannya secara terorganisir. Menurut Arbi Sanit (1998) pemberdayaan adalah upaya untuk mengubah segenap

potensi masyarakat menjadi kekuatan, melindungi, dan memperjuangkan nilainilai serta kepentingan mereka dalam segala aspek kehidupan.

Pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik-tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan sumber daya lokal sebaik mungkin. Dalam arti luas, pemberdayaan masyarakat yaitu proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai suatu kesejahteraan jangka panjang.

Desa Tampa merupakan salah satiu desa di kabupaten Luwu yang memiliki sumber daya lahan yang cukup luas sehingga selama lebih dari dua tahum terakhir masyarakat setempat mulai memanfaatkan lahannya untuk membudidayakan tanaman jagung dengan tujuan untuk menambah penghasilannya. Jika dilihat dari potensi sumber daya alam, Desa Tampa memiliki prospek yang cukup baik sebagai penghasil produksi jagung yang menjanjikan apabila masyarakat menyadari bahwa bidang pertanian dapat dijadikan sebagai aset yang menjanjikan masa depan mereka. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, tentunya sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya khususnya dari sektor pertanian. Menurut salah satu pemerintah desa bahwa pemberdayaan masyarakat petani jagung melalui pelatihan dan pembinaan serta memberikan bantuan fasilitas berupa benih/bibit kepada masyarakat petani jagung sudah pernah dilaksanakan sejak tahun 2020 oleh pemerintah daerah dalam hal ini BPP Kecamatan Ponrang yang bekerja sama dengan pemerintah desa.

Pemberdayaan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara berkelanjutan, selanjutnya masih dalam tahap perencanaan dimana pemerintah desa dan tim penyuluh pertanian akan terus melakukan kontrol kepada masyarakat desa Tampa serta mengajak masyarakat untuk selalu hadir dalam musyawarah yang adakan pemerintah desa agar bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya dan melakukan pendataan mengenai kebutuhan tersebut. Dalam hal ini pemerintah desa melakukan pendataan terkait dengan kebutuhan berupa benih/bibit yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengelola pertaniannya. Selain itu, pemerintah desa juga mengusulkan kepada pemerintah daerah atau BPP kecamatan Ponrang mengenai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat petani jagung

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan petani jagung yang dilakukan oleh pemerintah desa yang bekerja sama dengan BPP kecamatan Ponrang tentunya yang menjadi pertimbangan adalah faktor pendukung yang menjadi hal yang mendasar untuk dikembangkan. Menurut pemerintah hal sangat penting adalah dilihat dari potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut sehingga menjadi pertimbangan utama dilaksanakannya pemberdayaan petani jagung didesa Tampa. Dalam hal ini, potensi sumber daya yang dimiliki adalah berupa lahan perkebunan yang dikelola oleh masyarakat dalam membudidayakan tanaman jagung sehingga sangat mendukung untuk diberdayakan.

Namun, untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut, tentunya harus dibarengi dengan sumber daya manusia. Karena dalam memanfaatkan sumber daya alam dibutuhkan sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat setempat, seperti jagung didesa Tampa yang telah dibudidayakan masyarakat yang bernilai ekonomi sehingga dapat menambah penghasilannnya.

Selanjutnya menurut pemerintah yang juga menjadi faktor pendukung dilakukannya pemberdayaan petani jagung didesa Tampa adalah karena pemerintah melihat bahwa pemasaran jagung terus meningkat dan selalu dibutuhkan oleh peternak ayam sehingga sangat perlu untuk diberdayakan.

Selain faktor pendukung dalam pemberdayaan petani jagung melalui pendidikan dan pelatihan juga terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Menurut pemerintah yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan petani jagung adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti arahan yang disampaikan oleh pemerintah dan tim penyuluh. Pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah melalui pembinaan dan pelatihan baik itu arahan langsung dilapangan atau musyawarah yang diadakan pemerintah hanya dikuti oleh segelintir orang saja. Seharusnya dalam kegiatan pembinaan ini diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat petani sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah dapat diterapakan oleh petani jagung. Tentunya bahwa pemerintah telah menyediakan ruang bagi masyarakat agar dapat menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya dalam mengelola pertanian

jagungnya.

Pemerintah telah melakukan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan petani jagung pakan ternak didesa Tampa dengan melakukan pembinaan dan pelatihan serta memberikan fasilitas berupa bantuan benih dan alat mesin penggiling. Tentunya bahwa jika hal ini direspon baik oleh masyarakat maka akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga yang dihasilkan dari hasil produksi pertanian jagung.

Selama lebih dari dua tahun terakhir, sebagian besar masyarakat desa Tampa berprofesi sebagai petani jagung. Sebelumnya masyarakat berprofesi sebagai petani cengkeh. namun penghasilan dari cengkeh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga masyarakat desa Tampa memanfaatkan lahan mereka untuk membudidayakan tanaman jagung. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan petani jagung didesa Tampa dengam memberikan pembinaan dan pelatihan dalam mengelola tanaman jagung mulai dari pra produki hingga pasca produksi serta bantuan fasilitas berupa benih/bibi dan alat mesin penggiling (doros) yang dikelola oleh BUMDES. Melalui pemberdayaan masyarakat petani tentu sangat berpengaruh terhadapap kesejahteraan ekonomi masyarakat, berdasarkan data hasil wawancara di masyarakat, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan perekonomian masyarakat petani jagung dimana pendapatan masyarakat sebelum diadakannya pelatihan atau pembinaan terhadap petani jagung itu berada dikisaran Rp.6.000.000/panen jika luas lahan sekitar 0.50 Ha dan setelah diadakannya pelatihan terjadi peningkatan lebih dari Rp.7.500.0000.

Sedangkan jika luas lahan 1.00 Ha pendapatan yang diperoleh masyarakat petani jagung sebelum adanya pelatihan rata-rata kisaran Rp.13.000.000. dan setelah diadakannya pelatihan terjadi peningkatan dikisaran lebih dari Rp.17.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berperan dalam meningkatkaan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan petani jagung pakan ternak didesa Tampa.

Pemerintah daerah dalam hal ini BPP kecamatan Ponrang dan pemerintah desa sebaiknya dalam melalukan pmeberdayaann petani berupa pelatihan berupa materi tentang cara pengolahan tanah baik, pemilihan bibit yang bermutu dan pemupukan yang baik. Selain itu pemerintah dan Tim penyuluh harus selalu aktif dalam memberikan arahan kepada masyarakat petani jagung didesa Tampa.

Pemerintah desa diharapkan untuk melakukan usulan kepada pemerintah daerah mengenai kebutuhan petani. Pemerintah desa juga harus mengusulkan mengenai pendampingan khusus kepada masyarakat petani untuk lebih mengembangkan sumber daya manusia di Desa Tampa sehingga dengan adanya budidaya jagung ini diharapkan dapat memberi gerakan positif bagi masyarakat petani dalam meningkatkan perekonomiannya.

Selain itu kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan dalam kegiatan ini karena tersebut merupakan faktor terpenting bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Kondisi petani sendiri tidak memiliki inovasi baru dalam mengelolah tanaman jagungnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang masih tradisional dan takut gagal dalam mencoba inovasi baru. Maka dari itu diharapkan adanya pertisipasi antara masyarakat dan pemerintah dalam kegiatan ini sehingga

kesejahteraan ekonomi dapat diwujudkan.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan petani jagung di desa Tampa pemerintah Desa Yang bekerja sama dengan BPP Kecamatan Ponrang menggunakan konsep pemberdayaan dengan memberikan pelatihan, pendidikan serta pendampingan kepada masyarakat petani dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyrakat dalam mengelola pertanian jagungnnya. Selain itu, pemerintah setempat memberikan bantuan fasilitas berupa benih/bibit dan alat mesin penggiling (doros) agar memudahkan masyarakat pada saat setelah panen.
- 2. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang mengacu pada UU nomor 06 tahun 2014 tentang pemberdayaan masyarakat desa telah di implementasikan oleh pemerintah. Hal ini di tandai dengan adanya upaya dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakatnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Pemerintah daerah dalam hal ini BPP kecamatan Ponrang dalam kebijakannya dalam pemberdayaan petani melalui pelatihan lebih memfokuskan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat petani jagung agar lebih inovatif lagi dalam mengelola tanaman jagungnya sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal sesuai yang diharapkan petani.
- 2. Pemerintah daerah dalam hal ini BPP Kecamatan Ponrang dan pemerintah desa diharapakan agar kedepannya dalam melaksanakan pemberdayaan petani jagung di Desa Tampa tidak hanya berfokus pada pelatihan dan bantuan fasilitas berupa benih saja tetapi juga pada pelatihan pembuatan pupuk dan juga bantuan fasilitas pupuk sehingga memudahkan petani jagung dalam mengakses pupuk jika dibutuhkan.
- 3. Pemerintah desa diharapkan memberikan usulan kepada pemerintah daerah kebutuhan masyarakat. Tentunya tidak hanya berfokus pada bantuan fasilitas berupa benih/bibit serta alat mesin saja namun juga harus mengusulkan mengenai pendampingan khusus dengan tujuan untuk memberdayakan petani jagung didesa Tampa sehingga kesejahteraan ekonomi didaerahh dapat diwujudkan.
- 4. Kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan dalam kegiatan ini kerena hal tersebut merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tentunya bahwa dalam kegiatan ini perlu ada keterlibatan antara

masyarakat dan pemerintah agar apa yang kebutuhan masyarakat segera diwujudkan. Oleh karena itu kontribusi antara pemerintah dan masyarakat lebih ditingkatkan lagi.



DAFTAR PUSTAKA

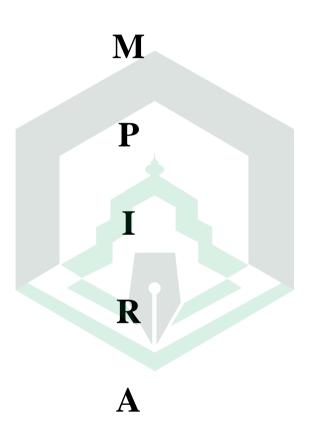
- A. Ghofar Purbaya, Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut Di Pantai Kenjeran Lama Surabaya, Jurnal Of Economics Vol 1 No.1, 2016, H. 75-76
- Ahmad Rifki Hermawan, Skripsi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, (Lampung, 2020)
- Amirul Hadi Dan Hariyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Untuk Iain Dan Ptain Semua Jurusan Komponen Mkk*, (Bandung: Pustaka Setia, 1988), 47.
- Anwas, M. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Globalisasi*. (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 1-2
- Armando Soeres, Ratih Nurpratiwi Dan M. Makmur Dalam Jurnalnya Yang Berjudul"
- BPS, (Badan Pusat Statistik) "Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu 2020"
- Chyntia P. Marentek, Pdf, "Peran Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah", 1.
- Dedeh Maryani Dan Ruth Roselin E Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019) H. 1
- Deni Ardila Dan Fitri Eriyanti, *Pemberdayaan Petani Jagung Oleh Stakeholders Di Nagarai Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Ariaman*, Journal Of Education On Social Science Vol 3 No. 2 Oktober 2019, H. 34-35
- Deni Ardila, Fitri Eriyanti "Pemberdayaan Petani Jagung Oleh Stakeholders Di Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman" *Journal Of Education On Social Science*, Vol. 3 No. 2, 2019.
- Effi Aswita Lubis, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Medan: Unimed Press, 2012), 46
- Hammi Cahya Prastika "Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Dikabupaten Magetang" (Surabaya 2017), 24.
- HAW. Widjaja," Otonomi Daerah" (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) 14.
- Hendry Remi Wantania, Fanley Pangemanan Dan Welly Waworundeng

- "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Buah Pepaya Di Desa Laikit Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal Governance*, Vol. 2 No. 1 2022.
- Hessel Nogi Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, (Lukman Offset, Yogyakarta: 2003),2.
- James E. Anderson, *Public Policimaking-Sixich Edition*, (Houghton Miffilin Company, Boston. 2006), 3-4.
- Laporan Penyelenggaraan Desa (LPPD) Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu 2021
- Laporan Penyelenggaraan Desa (LPPD) Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu 2021
- Muh Nurdin, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Dikecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, 2015, 3-4.
- Muh Rulan Abdullah, Pengelolaan Zakat dalam Tinjauan UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2018 vol 3 no 1.
- Muhammad Yunus Dan Eka Pratiwi Septania Parapat, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menciptakan Kesejahteraan Keluarga Melalui Budi Daya Jagung Di Desa Sarimatondang*, Jurnal EK&BI Vol \$ No.2 Desember 2021, H. 518-519
- Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah" Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik 4, No 2 (2015), 232. Https://Publikasi.Unitri.Ac.Id/Indeks.Php/Fisip/Article/View/102#.
- Rahmi, Skripsi Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bantaeng, (Makassar, 2018), 4.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No. 32 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No.32 Tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.32 Tentang Pemerintahan Daerah 2004
- Riant Nugroho, Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 60.
- Rofiatul Maghfiroh, Nurul Umi Ati, Dan Sunariyanto "Implementasi Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo)", *Jurnal Respon Publik*, Vol. 15 No. 4 2021.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT. Raja Grasindo,2007), 27-30.
- Saifuddin Yunus, Dr. Suadi, Fadli "Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu" (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017) 1&3.

- Sarman, MH Dan Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH., MH, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rineka Cipta 2019),104.
- Sugiyono, Metode Penelitian & Dan Pengembangan Research And Development/ R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 369-375.
- Sugiyono, *Metode Penelitian* Bisnis (Gegerkalong Hilir No. 48 Bandung: Alvabeta, Cv, 2017), 220-229.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, No.1 (Bandung: Alfabeta, 2016), 145.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, No.1 (Bandung: Alfabeta,2016), 137.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 15.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Jl. Wonosari Km.6 Demblaksari Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2020),19.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Jl. Wonosari Km.6 Demblaksari Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020)



A



N

SURAT IZIN MENELITI



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP Alamat ; Jin. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Tejoon ; (0471) 3314115

190/PENELITIAN/11.06/DPMPTSP/V/2022

Perihal: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth, Ka, Desa Tampa

di -Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : B 320/ln.19/FEBI.04/KS.02/04/2022 tanggal 28 April 2022 tentang permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Tempat/Tgl Lahir Nim Jurusan

Zulpadli Tampa / 10 Juni 2000 18 0401 0184 Ekonomi Syariah Dsn. Bakka

Desa Tampa Kecamatan Ponrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN PETANI JAGUNG PAKAN TERNAK DI DESA TAMPA KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di DESA TAMPA, pada tanggal 10 Mei 2022 s/d 10 Juli 2022

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
- 2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
- 3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
- 5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.





Diterbitkan di Kabupaten Luwu Pada tanggal: 10 Mei 2022

Kepala Dinas,

Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA Pangkat : Pembina Tk. I IV/b NIP: 19641231 199403 1 079

- 1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
- 2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab, Luwu di Belopa;
- 3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
- 4. Mahasiswa (i) Zulpadli;
- 5. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

Berikut daftar wawancara kepada Pemerintah daerah (BPP kecamatan Ponrang), Pemerintah Desa dan masyarakat petani jagung Desa Tampa:

A. BPP KECAMATAN PONRANG

- 1. Apakah ada pemberdayaan yang diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha, baik itu berupa dana ataupun bantuan lainnya?
- 2. Apakah bantuan yang di berikan kepada para petani jagung dibagikan secara merata atau hanya pihak-pohak tertentu saja yang menerimanya?
- 3. Apakah ada fasilititas yang diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan petani jagung mulai dari pra produksi hingga pasca produksi?
- 4. Bentuk pendidikan dan pelatihan apa yang diberikan oleh BPP Kecamatan Ponrang kepada masyarakat petani jagung di Desa Tampa?
- 5. Apa yang menjadi pertimbangan BPP Kecamatan Ponrang memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat petani jagung di Desa Tampa?

B. PEMERINTAH DESA

- Bagaimana keterlibatan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani jagung di Desa Tampa?
- 2. Bagaimana kerjasama antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam hal ini BPP Kecamatan Ponrang dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani jagung di Desa Tampa?

3. Menurut Pemerintah Desa potensi apa yang perlu dikembangkan di daerah khususnya Desa Tampa sehingga dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat?

C. MASYARAKAT PETANI JAGUNG

- 1. Bagaimana perkembangan perekonomian petani jagung setelah diadakannya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam hal ini BPP Kecamatan Ponrang?
- 2. Bagaimana pendapatan masyarakat petani jagung setelah diadakannya pemberdayaan?
- 3. Apakah pendapatan dari hasil perkebunan jagung ini dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?
- 4. Apakah pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini BPP Kecamatan Ponrang dapat membantu petani jagung dalam meningkatkan perekonomiannya?
- 5. Dengan adanya pendidikan dan pelatiham yang diberikan, apakah masyarakat petani jagung ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut?
- 6. Setelah adanya pendidikan dan pelatihan yang diberikan apakah ada kendala atau hambatan yang dialami oleh petani dalam menerapkannya?



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR: 551 TAHUN 2022 TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHRI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang bahwa demi kelancaran proses pengujian tugas akhir skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;

bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat

Kenutusan Rektor. Mengingat

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : Penunjukan penguji dari ketua prodi

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI Menetapkan TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM

NEGERI PALOPO

Pertama Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana

yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.

Tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa adalah : mengoreksi, mengarahkan, Kedua

menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan

karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada

DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2022.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan Keempat

pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat

kekeliruan di dalamnya.

Kelima Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Palopo : 24 Agustus 2022

Ekonomi dan Bisnis Islam

Tembusan:

1. Kabiro AUAK;

Pertinggal;
 Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NOMOR : 551 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Zulpadli

> : 18 0401 0184 NIM

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi

melalui Pemberdayaan Petani Jagung Pakan Ternak di Desa Tampa

Kabupaten Luwu.

III. Tim Dosen Penguji

Ketua Sidang : Dr. Takdir, SH., M.H.

Sekretaris : Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

Penguji Utama (I) : Zainuddin S, SE., M.Ak.

Pembantu Penguji (II) : Muh. Ikhsan Purnama, SE.Sy., M.E.

Palopo, 24 Agustus 2022

as Ekonomi dan Bisnis Islam

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul:

"Kebijakan Pemerintah (UU Nomor 06 Tahun 2014) Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Petani Jagung di Desa Tampa'

Yang ditulis oleh:

Nama

: Zulpadli

Nim

: 18 0401 0184

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Kebijakan Pemerintah (UU Nomor 06 Tahun 2014)

Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Petani Jagung di Desa

Tampa

Menyatakan bahwa skripsi tesebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing

NIP. 198102132006042002

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp

Hal

: Skripsi an. Zulpadli

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Zulpadli

Nim : 18 0401 0184

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah (UU Nomor 06 Tahun 2014)

Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Petani Jagung di Desa

Tampa

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan

layak diajukan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Pembimbing

NIP. 198102132006042002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Kebijakan Pemerintah (UU Nomor 06 Tahun 2014) Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Petani Jagung di Desa Tampa yang ditulis oleh Zulpadli NIM 18 0401 0184, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil pada hari Jumat tanggal 30 bulan September tahun 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

- Dr. Takdir, S. H., M. H. Ketua Sidang
- 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. EI., M. A. Sekretaris Sidang
- Zainuddin S, S. E., M. Ak. Penguji I
- Ikhsan Purnama, S. E. Sy., M. E. Penguji II
- Dr. Fasiha, M. EI. Pembimbing Utama

(

ranggan

Tanggal:

Tanggal

Tanggal:

Tanggal:

NOTA DINAS PENGUJI

Zainuddin S, S. E., M. Ak.

Ikhsan Purnama, S. E. Sy., M. E.

Dr. Fasiha, M. EI.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : 1 (satu) Skripsi

Hal : skripsi an. Zulpadli

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi,bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama

: Zulpadli

NIM Program Studi : 18 0401 0184 : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: Kebijakan Pemerintah (UU Nomor 06 Tahun 2014)

Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Petani Jagung di

Desa Tampa

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

1. Zainuddin S, S. E., M. Ak.

Penguji I

Tanggal

2. Ikhsan Purnama, S. E. Sy., M. E.

Penguji II

3. Dr. Fasiha, M. EI.

Pembimbing Utama

Tanggal:

Tangoal

NOTA DINAS TIM VERIFIKASI

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

NOTA DINAS

Lamp

: 1 (satu) Skripsi

Hal

: skripsi an. Zulpadli

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama

: Zulpadli

NIM

: 18 0401 0184

Program Studi

: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: Kebijakan Pemerintah (UU Nomor 06 Tahun 2014) Tentang

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Ekonomi Petani Jagung di Desa Tampa

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

- Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
- Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya. Wassamu' alaikum wr. wb

Tim Verifikasi

 Hardianti Yusuf, S. E. Sy., M. E. Tanggal: 20 Oktober 2022

2. Kamriani, S. Pd.
Tanggal: 25 Oktober 2008

(Jauli)

CEK PLAGIASI

Kebijakan Pemerintah (UU nomor 06 Tahun 2014) Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Petani Jagung Di Desa Tampa

ORIGINALITY REPORT			
22%	22%	7%	8%
SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDEN			STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
repository.iainpalopo.ac.id Internet Source			10%
digilibadmin.unismuh.ac.id			3,
repo.apmd.ac.id			29
jess.ppj.	unp.ac.id		29
Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper			edirman 1
Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper			esia 1 g
	repository.unimal.ac.id		
publikasiilmiah.unwahas.ac.id			<19

text-id.123dok.com

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Aparat Desa





Wawancara dengan Anggota BPP Kecamatan Ponrang



Wawancara dengan Kepala Desa Tampa





Wawancara dengan masyarakat petani jagung dan tokoh masyarakat



Wawancara dengan Ketua BPP Kecamatan Ponrang





Dokumentasi lahan perkebunan jagung



Dokumentasi aktivitas masyrakat petani jagung



Wawancara dengan Penyuluh pertanian Desa Tampa





Wawancara dengan Ketua kelompok Tani



RIWAYAT HIDUP

Zulpadli, lahir di Tampa pada tanggal 10 Juni 2000. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sudirman dan ibu Sumarni. Saat ini bertempat tinggal di Desa Tampa Kec. Ponrang, Kab. Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN

551 Tampa. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Bua Ponrang hingga tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Bua Ponrang yang sekarang berganti nama menjadi SMA Negeri 15 Luwu. Setelah lulus SMA di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu program studi Ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person penulis: zulpadli0184_18@iainpalopo.ac.id